

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Mei II Tahun 2022 No. 34

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag.

Ujaran Rasis Rektor ITK di Medsos

Mendikbud Diminta Bertindak Tegas



Meninggikan Keadaban dan Relevansi Sosial

Jika sikap lalai (sinis terhadap jilbab.red) tersebut keluar dari orang yang tak pernah punya track record akademik, miskin dalam membaca sejarah pergaulan dan pergumulan bangsa dengan islam. Maka kita bisa abaikan sembari memahami. Tapi ini dari seseorang yang memiliki derajat akademik yang tinggi.

Tanggal 15 Maret 2022, dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ditetapkan sebagai Hari Internasional Melawan Islamophobia. Setahun sebelum itu, di empunya demokrasi, senator Ihlam Omar keturunan imigran Afrika, keturunan presiden dalam mengeluarkan perintah eksekutif yang memberlakukan pembatasan perjalanan di masa depan.

Dalam sejumlah kesempatan di Sea Games Vietnam 2021 atlet Indonesia mampu menunjukkan prestasi yang luar biasa tanpa harus menanggalkan identitas religius yang mereka miliki. Bahkan industri olahraga kini memunculkan banyak sekali outfit atau pakaian yang menyesuaikan dengan kebutuhan keyakinan religiusitas itu. Kita paham bahwa ujungnya bukan hanya agar digunakan para atlet, namun jauh lebih dalam karena pasar yang menuntut penyesuaian.

Ironisnya di Indonesia, ada seseorang yang bergelag sangat

tinggi dan memiliki kedudukan luhur di sebuah institusi akademik justru menghadirkan tanggapan sinis terhadap para muslimah yang mengenakan hijab atau jilbab. Mencermati situasi tersebut sungguh membuat setiap kita menjadi pilu dan dipaksa mundur beberapa abad ke belakang (set back).

Terlebih sikap tersebut dilakukan dalam sebuah proses dari lembaga beasiswa pendidikan yang menjunjung nilai-nilai Pancasila. Melakukan proses review secara sinis terhadap calon-calon pemimpin masa depan berpijak dari apa

yang dikenakan, kemudian menegasikan situasi tersebut dengan kecerdasan. Seolah-olah yang mengenakan tidaklah cerdas, seolah-olah orang yang memiliki paham keagamaan itu tidaklah pintar, seolah-olah kepintaran itu berdiri sendiri tanpa ada dasar dan nilai yang melandasinya. Padahal dunia dan tatanan sosial yang ada di dalamnya kini tidak bisa mengelakkan "fenomena" itu, bahwa religiusitas menjadi bagian tidak terpisahkan dalam keadaban manusia. Mampu mengisi ruang kosong dan menstimulasi capaian.

Kita khawatir cara pandang ini melegitimasi sikap yang apriori dan ingin menang sendiri. Hanya karena tidak mendukung otoritas, kemudian berulang kali dijebak, disudutkan dan dipaksa dengan stigma radikal serta intoleransi. Jika sikap lalai tersebut keluar dari orang yang tak pernah punya track record akademik, miskin dalam membaca sejarah pergaulan dan pergumulan bangsa dengan Islam. Maka kita bisa abaikan sembari memahami. Tapi ini keluar dari seseorang yang memiliki derajat akademik yang tinggi. Sedih.

Legislator PKS Desak Kemendikbud Ristek, **Tindak Tegas** Rektor ITK Budi Santosa

KUTIPAN

Legislator perempuan yang juga menjabat sebagai sekretaris organisasi ternama di Sulawesi Tengah Wanita Islam Alkhairaat ini pun mengingatkan selayaknya seorang guru besat memberikan teladan yang baik.

Palu (06/05) — Kritik keras terus bermunculan atas pernyataan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof. Budi Santosa Purwokartiko yang mengatakan penutup kepala ala manusia gurun kepada wanita yang mengenakan jilbab.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri pun memberikan kritik keras terhadapnya.

“Pernyataan Budi Santoso Purwokartiko yang ia tulis di akun media sosial miliknya terkait wawancara yang ia

lakukan terhadap mahasiswa yang ikut program LPDP berbau tendensius dan ujian kebencian” ungkapnya.

Legislator perempuan yang juga menjabat sebagai sekretaris organisasi ternama di Sulawesi Tengah Wanita Islam Alkhairaat ini pun mengingatkan selayaknya seorang guru besat memberikan teladan yang baik.

“Seharusnya seorang pengajar, akademisi apalagi sudah menjadi guru besar memberikan tauladan yang baik dalam berkata dan bukan justru mengeluarkan pernyataan yang

berbau SARA dan ujaran kebencian,” imbuhnya.

Kalau ini dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan tegas, akan menciderai dunia pendidikan, mencabik-cabik Pancasila dan merusak kebhinekaan yang selama ini terjalin dengan baik.

“Saya mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk segera bertindak dengan tegas. Apa yang dilakukan oleh Budi Santosa Purwokartiko sudah selayaknya ditindak tegas,” ungkap legislator PKS Sulawesi Tengah ini.



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

“Saya mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk segera bertindak dengan tegas. Apa yang dilakukan oleh Budi Santosa Purwokartiko sudah selayaknya ditindak tegas,

Anggota FPKS Desak Kepolisian Panggil
Rektor Perguruan Tinggi yang Unggah
Ujaran Kebencian di Medsos



**Saya tidak habis mengerti,
bagaimana mungkin seorang
pendidik, bahkan seorang Guru
Besar, dan juga seorang
pimpinan Perguruan Tinggi
(Rektor) bersikap dan bertindak
provokatif merobek-robek
kesatuan bangsa**

**Dr. H. FAHMY
ALAYDROES,
MM, M.Ed**

Anggota Komisi X DPR RI





Masyarakat Sulawesi Tengah **Dorong** Salim Segaf sebagai Tokoh Pemersatu

KUTIPAN

Palu (16/05) --- Ada cerita di balik perhelatan besar Haul Gurutua SIS Aljufri di kota Palu, Sulawesi Tengah. Puluhan ribu orang dari berbagai daerah memadati kompleks Perguruan Alkhairat dan jalan-jalan di sekitarnya.

Tiga orang Gubernur tampak di panggung acara dari Sulawesi Tengah (Rusdy Mastura), Maluku Utara (Abdul Gani Kasuba), dan Kalimantan Utara (Zainal Arifin Paliwang) bersama tamu dari Timur Tengah dan daerah lain.

Setelah Gubernur Sulteng memberikan sambutan tentang usulan Gurutua sebagai Pahlawan Nasional, tampil tokoh nasional Salim Segaf al-Jufri memberi tausiyah. Salim adalah cucu dari Gurutua SIS Aljufri, pernah menjabat Menteri Sosial (2009-2014).

Ceramah singkat Salim disambut tepuk tangan karena menekankan peran Gurutua tidak hanya bagi Alkhairat dan masyarakat Sulteng, tetapi juga bagi kemerdekaan Indonesia.

"Gurutua pernah

merespon proklamasi kemerdekaan RI oleh Bung Karno dan berinteraksi langsung dengan KH Hasyim Asy'ari di Jombang," jelas Salim.

Salim kemudian memaparkan kondisi Sulteng dan Indonesia yang penuh tantangan, serta perlunya tampil sosok pemimpin yang memiliki visi kebangsaan dan kepabakan (mengayomi).

"Visi kebangsaan jelas bersumber dari Sumpah Pemuda 1928 yang menyatakan bertanah-air, berbangsa dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Sementara visi kepabakan memunculkan sikap empati terhadap penderitaan rakyat dan berusaha keras untuk menyelesaikan berbagai persoalan nyata," Salim menegaskan.

Sebagai ilustrasi, Salim

mengutip kisah tentang masyarakat semut yang khawatir dengan dampak kekuasaan Raja Sulaiman dan bala tentaranya.

Dalam al-Qur'an diungkapkan: 'Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berucaplah seekor semut: 'Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.' (QS An-Naml: 18).

Seekor semut mewakili komunitasnya, sadar betapa perkasa pasukan Sulaiman, dan karena itu memilih untuk bersembunyi di sarangnya. Rakyat semut berprasangka baik, bahwa mungkin Sulaiman tidak menyadari perbuatannya.

Namun, Sulaiman mendengar dan mengerti percakapan semut, sehingga memerintahkan pasukannya untuk berhati-hati dan menghindari sarang semut. Itulah sikap pemimpin yang memiliki kekuasaan besar sekaligus jiwa besar: melindungi seluruh rakyat, meski hanya seekor semut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

**Dr. SALIM**

Ketua Majelis Syuro PKS

"Visi kebangsaan jelas bersumber dari Sumpah Pemuda 1928 yang menyatakan bertanah-air, berbangsa dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Sementara visi kepabakan memunculkan sikap empati terhadap penderitaan rakyat dan berusaha keras untuk menyelesaikan berbagai persoalan nyata"





Ustadz Abdul Somad Dicekal,

Pemerintah Harus **Panggil** Dubes Singapura



Negara Singapura ini merasa dirinya besar, Indonesia tidak dianggap sebagai mitra strategisnya. Sesukanya memperlakukan tokoh sekaliber UAS. Jika sekaliber UAS diperlakukan seperti itu, apalagi rakyat kecil!

Dr. H. SYHRUL AIDI
MAAZAT, Lc., M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Riau



UAS Dicekal.

Anggota FPKS Minta Pemerintah Panggil Dubes Singapura

● KUTIPAN

Jakarta (17/05) --- Pihak keimigrasian Singapura tiba-tiba mendeportasi ulama kandang, Ustadz Abdul Somad (UAS) tanpa penjelasan. Perlakuan imigrasi Singapura itu dianggap melecehkan Indonesia.

Anggota Fraksi PKS dari Dapil Riau II, Syahrul Aidi Maaizat pada Selasa (17/5) pagi menyatakan bahwa perlakuan imigrasi Singapura itu tidak baik. Ulama besar sekaliber UAS tidak sepatutnya diperlakukan seperti itu.

“Negara Singapura ini merasa dirinya besar, Indonesia tidak dianggap sebagai mitra strategisnya. Sesukanya memperlakukan tokoh sekaliber UAS. Jika sekaliber UAS diperlakukan seperti itu, apalagi rakyat kecil!” tegas Dr Syahrul Aidi.

Insiden kejadian yang tidak mengenakan hal itu, dia mendesak pemerintah segera memanggil Dubes Singapura untuk mengklarifikasi. “Kapan perlu Pemerintah Singapura

melalui Dubes Singapura minta maaf” tegas alumni Al Azhar Mesir ini.

Dia menambahkan, jasa Indonesia terhadap Singapura sangat besar. Singapura harus pandai menjaga adab dan etika bernegara.

Pada Senin (16/5/2022) siang hingga sore, Ustadz Abdul Somad (UAS) mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan saat hendak melakukan dakwah di Singapura. Kepada Republik, mubaligh tersebut menuturkan dirinya sempat dimasukkan dalam ruangan sempit. Otoritas keimigrasian negara tersebut kemudian memintanya kembali ke Indonesia.



**Dr. H. SYAHRUL AIDI
MAAZAT, Lc., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau II

“Negara Singapura ini merasa dirinya besar, Indonesia tidak dianggap sebagai mitra strategisnya. Sesukanya memperlakukan tokoh sekaliber UAS. Jika sekaliber UAS diperlakukan seperti itu, apalagi rakyat kecil”

Fraksi PKS Minta Dubes Singapura **Klarifikasi** Alasan UAS 'Dideportasi' dari Negeranya

KUTIPAN

Jakarta (17/05) --- Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menerima banyak aspirasi dari para ustadz dan masyarakat umum yang memprotes tindakan tidak diizinkan masuk atau 'dideportasi'--sesuai pengakuan--Ustadz Abdul Shomad (UAS) dari Singapura.

Mereka meminta agar PKS mempertanyakan alasan 'deportasi' tersebut agar jelas dan tidak muncul prasangka negatif terhadap ulama sekaliber UAS.

"Ustadz Abdul Shomad ini ulama yang dihormati dan memiliki banyak jamaah di tanah air. Wajar jika banyak yang mempertanyakan dan memprotes perlakuan otoritas Singapura tersebut," ungkap Jazuli.

Atas banyaknya aspirasi tersebut dan pertanyaan dari publik di Indonesia, Anggota Komisi I DPR ini mendesak Kedutaan Singapura di Jakarta bisa memberikan klarifikasi

sejelas-jelasnya. Menurutnya, banyak juga masyarakat yang mention akun media sosial Kedutaan Singapura untuk meminta penjelasan dan klarifikasi tersebut.

"Tentunya harus ada alasan jelas mengapa seseorang dilarang masuk atau 'dideportasi' dari suatu negara. Apalagi UAS seorang ulama dan intelektual terhormat di Indonesia. Jangan sampai ada alasan yang tidak mendasar, like and dislike, dan praduga yang tidak jelas atau tidak ada buktinya," terang Anggota Komisi I DPR ini.

Setiap WNI bukan hanya UAS, kata Jazuli, yang telah

mengurus dan memiliki dokumen yang dipersyaratkan untuk masuk negara lain harus diperlakukan dengan baik. Jika ada penolakan, maka atas nama transparansi dan akuntabilitas, otoritas negara tersebut harus menjelaskan alasannya.

"Sehingga ini berlaku bagi siapa saja warga negara kita, bukan hanya UAS," ungkap Jazuli.

Karenanya, kembali Fraksi PKS meminta Kedutaan Besar Singapura untuk memberi penjelasan dan klarifikasi karena hal ini sudah menjadi isu publik agar tidak muncul spekulasi yang kontraproduktif dan mengganggu hubungan baik kedua negara.

"Fraksi PKS akan menanyakan langsung kepada Dubes Singapura di Jakarta melalui Kemenlu," pungkas Jazuli.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Tentunya harus ada alasan jelas mengapa seseorang dilarang masuk atau 'dideportasi' dari suatu negara. Apalagi UAS seorang ulama dan intelektual terhormat di Indonesia. Jangan sampai ada alasan yang tidak mendasar, like and dislike, dan praduga yang tidak jelas atau tidak ada buktinya"



Bersama Dubes Indonesia untuk Spanyol, Bukhori Sampaikan Solidaritas Indonesia untuk Palestina

KUTIPAN

Anggota Komisi VIII ini berharap, pesan solidaritas dari bangsa Indonesia ini bisa membasuh luka rakyat Palestina, khususnya rekan-rekan media Aljazeera akibat tindakan represi tentara Israel.

Jakarta (16/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyampaikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Hal itu dinyatakan secara langsung di hadapan utusan diplomatik Palestina saat berkunjung ke kantor kedutaan Palestina di kota Madrid bersama Duta Besar Indonesia untuk Spanyol Dr. Muhammad Najib di sela kunjungan kerjanya.

“Mewakilli pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI, kami menyampaikan belasungkawa sekaligus pesan solidaritas kami untuk perjuangan rakyat Palestina. Kami menyadari bahwa situasi di sana kian getir belakangan ini, terlebih setelah insiden

gugurnya jurnalis senior Aljazeera keturunan Palestina, Shireen Abu Akleh, akibat ditembak oleh tentara zionis Israel,” ucap Bukhori di Madrid, Ahad (15/5/2022).

Shireen Abu Akleh adalah jurnalis Aljazeera keturunan Palestina berkewarganegaraan Amerika Serikat. Wanita kelahiran Yerusalem tersebut ditembak mati oleh tentara Israel saat tengah meliput serangan tentara Israel di kamp pengungsi Jenin, Tepi Barat. Pembunuhan terhadap reporter tersebut menuai banyak kecaman dari masyarakat internasional karena dinilai melanggar hukum humaniter internasional.

“Watak penjajahan adalah kekerasan. Kekerasan ini tidak

bisa dihentikan hanya dengan kecaman. Butuh tindakan nyata dari masyarakat global untuk mendukung kemerdekaan Palestina demi menghentikan berbagai kejahatan pemerintah penduduk Israel terhadap kemanusiaan,” tegas Bukhori.

Anggota Komisi VIII ini berharap, pesan solidaritas dari bangsa Indonesia ini bisa membasuh luka rakyat Palestina, khususnya rekan-rekan media Aljazeera akibat tindakan represi tentara Israel.

“Sekaligus juga dapat membangkitkan kesadaran masyarakat dunia untuk berdiri tegas dan konsisten mendukung kemerdekaan rakyat Palestina,” tutup Bukhori.



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

“Mewakilli pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI, kami menyampaikan belasungkawa sekaligus pesan solidaritas kami untuk perjuangan rakyat Palestina. Kami menyadari bahwa situasi di sana kian getir belakangan ini, terlebih setelah insiden gugurnya jurnalis senior Aljazeera keturunan Palestina, Shireen Abu Akleh, akibat ditembak oleh tentara zionis Israel,”

Batalkan Rencana Pengadaan Gordyn RJA Kalibata!

Fraksi PKS mendesak Setjen DPR untuk membatalkan Rencana pengadaan gordyn (RJA) Kalibata. Karena beberapa hal :

- **Gordyn ini bukan hal yang urgent terkait kinerja dewan.** apalagi sebagian besar gordyn RJA Kalibata kondisinya masih bagus. Kinerja DPR itu melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengadaan gordyn ini urusan Setjen DPR tapi isunya yang meluas mengganggu konstansi tugas utama dewan
- **Pengadaan gordyn ini mendapat reaksi dan kritik luas dari masyarakat.** maka DPR sebagai wakil rakyat harus mendengar kritik tersebut, harus peka dan sensitif. Tidak perlu berpolemik, dibatalkan saja.
- Di tengah kondisi masyarakat yang sulit ekonomi akibat pandemi, **DPR harus mengutamakan kepentingan rakyat sehingga lebih urgent anggaran untuk rakyat,** untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Di tengah kondisi masyarakat yang sulit ekonomi akibat pandemi, DPR harus mengutamakan kepentingan rakyat sehingga lebih urgent anggaran untuk rakyat, untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi

FPKS Tegas Minta Setjen **Batalkan** Pengadaan Gordyn RJA DPR Kalibata

KUTIPAN

Jakarta (13/05) --- Fraksi PKS DPR RI menggelar Konferensi Pers meminta Setjen DPR membatalkan pengadaan gordyn rumah jabatan anggota DPR (RJA) Kalibata. Konferensi pers dilaksanakan di RJA Kalibata pada Jum'at (13/05).

Ada tiga alasan yang melandasi sikap Fraksi PKS, lanjut Jazuli, Pertama, gordyn ini bukan hal yang urgent terkait kinerja dewan, apalagi sebagian besar gordyn RJA Kalibata kondisinya masih bagus.

"Kinerja DPR itu melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengadaan gordyn ini urusan Setjen DPR tapi isunya yang meluas mengganggu konstansi tugas utama dewan," ungkap Anggota DPR Dapil Banten ini.

Kedua, pengadaan gordyn ini mendapat reaksi dan kritik luas dari masyarakat, maka DPR sebagai wakil rakyat harus mendengar kritik tersebut, harus peka dan sensitif. Tidak perlu berpolemik, dibatalkan saja.

"Ketiga, di tengah kondisi masyarakat yang sulit ekonomi akibat pandemi, DPR harus utamakan kepentingan rakyat sehingga lebih urgent anggaran untuk rakyat, untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi," ungkap Jazuli.

Meskipun, lanjut Jazuli, anggaran gordyn DPR ini tidak banyak (sekitar 40 Miliar) jika dibandingkan anggaran IKN dan Kereta Cepat misalnya, tetap saja ini bukan soal besar kecilnya anggaran, tetapi soal kepekaan dan sensitifitas DPR di masa krisis saat ini.

"Maka tidak ada pilihan lain, tidak perlu berdebat, Fraksi PKS minta pengadaan gordyn RJA DPR : batalkan, batalkan, batalkan!," pungkas Jazuli.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Meskipun, anggaran gordyn DPR ini tidak banyak (sekitar 40 Miliar) jika dibandingkan anggaran IKN dan Kereta Cepat misalnya, tetap saja ini bukan soal besar kecilnya anggaran, tetapi soal kepekaan dan sensitifitas DPR di masa krisis saat ini. Maka tidak ada pilihan lain, tidak perlu berdebat, Fraksi PKS minta pengadaan gordyn RJA DPR : batalkan, batalkan, batalkan”



Fraksi PKS Tegas
Minta Setjen DPR

Batalkan Pengadaan Gordyn RJA Kalibata



Di tengah kondisi masyarakat yang sulit ekonomi akibat pandemi, DPR harus mengutamakan kepentingan rakyat sehingga lebih urgent anggaran untuk rakyat, untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi,"

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI





Kosongnya Aturan Soal LGBT Jadi Polemik, Fraksi PKS: **Itulah Alasan** PKS Tolak Pengesahan RUU TPKS

KUTIPAN

Jakarta (13/05) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengomentari polemik yang dipantik pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa menjerat pelaku LGBT karena tidak adanya hukum yang mengaturnya.

Mahfud MD mengatakan demokrasi harus diatur dengan hukum (nomokrasi). Sementara LGBT dan penyarannya itu belum diatur oleh hukum (sehingga) bukan menjadi kasus hukum.

Menurut Jazuli Juwaini alasan tersebut tidak bisa melepaskan tanggung jawab negara untuk menjaga moralitas masyarakat dan menjaga ketertiban umum.

Argumentasi kekosongan hukum atau alasan kebebasan, demokrasi, dan hak asasi tentu tidak bisa digunakan untuk

membiarkan perilaku yang jelas-jelas menyimpang di masyarakat.

"Tidak adanya aturan hukum yang menjerat pelaku LGBT justru menjadi tugas negara untuk mengaturnya demi menegakkan moralitas dan ketertiban umum karena demikianlah fungsi utama dari hukum," Jazuli.

Atas dasar itulah, lanjut Jazuli, beberapa waktu yang lalu Fraksi PKS menolak disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) karena tidak komprehensif

melarang segala bentuk tindak pidana kesusilaan termasuk LGBT dan perzinahan.

"Fraksi PKS menginginkan agar RUU TPKS disahkan bersamaan dengan revisi KUHP yang menegakkan larangan LGBT dan perzinahan karena fenomenanya sudah meresahkan dan mengancam moralitas dan ketertiban masyarakat," tegas Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan di atas kewajiban negara untuk menegakkan hukum, negara memiliki tanggung jawab menjaga moralitas masyarakat dan ketertiban umum.

Gerakan dan paham LGBT sering mendasarkan diri pada HAM dan masalah privat, padahal dalam konteks Indonesia hak asasi dibatasi oleh undang-undang yang menimbang nilai moral agama dan budaya.

"Negara kita tidak menganut kebebasan yang tanpa batas. Hal itu jelas merupakan amanat UUD 1945



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Fraksi PKS menginginkan agar RUU TPKS disahkan bersamaan dengan revisi KUHP yang menegakkan larangan LGBT dan perzinahan karena fenomenanya sudah meresahkan dan mengancam moralitas dan ketertiban masyarakat”

yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pasal 28 J menegaskan bahwa kebebasan individu diikat oleh nilai-nilai Pancasila dan dibatasi oleh undang-undang, dalam rangka

menghormati hak orang lain, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum,” terang Jazuli.

Selengkapnya kunjungi undang-undang, dalam rangka fraksi.pks.id



Kosongnya Aturan Soal
LGBT yang Jadi Polemik

Itulah Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU TPKS



Fraksi PKS menginginkan agar RUU TPKS disahkan bersamaan dengan revisi KUHP yang menegaskan larangan LGBT dan perzinahan karena fenomenanya sudah meresahkan dan mengancam moralitas dan ketertiban masyarakat

**Dr. H. JAZULI
JUWAINI, MA**
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Terkait Pelecehan oleh Rektor ITK, Aleg PKS Bela Hak-hak Perempuan

KUTIPAN

Jakarta (07/05) — Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof Budi Santosa Ketua FPKS DPR RI Netty Prasetyani meminta Kemendikbud Ristek dan LPDP memperbaiki sistem manajemennya secara serius.

"Harus ada evaluasi dan perbaikan sistem manajemen secara serius, jangan hanya berhenti pada pemecatan yang bersangkutan. Jika tidak berbenah diri, hal serupa dapat terjadi lagi di kemudian hari," ujar Netty dalam keterangannya.

Menurut Netty, sebagai lembaga yang menjadi tumpuan banyak generasi muda untuk mendapatkan dukungan biaya pendidikan di perguruan tinggi berkualitas, seharusnya LPDP memastikan para pewartawancaranya adalah orang-orang berjiwa Pancasilais yang

toleran, menghargai keyakinan agama seseorang dan objektif dalam menilai para calon penerima beasiswa.

"Ukuran open mind, kecerdasan dan integritas seseorang tidak dilekatkan pada pakaian yang dikenakan seseorang, tapi melalui proses penggalian pemikiran dan diskusi. Itulah tugas pewartawancara untuk melihat ke dalam, bukan judge the book by the cover," katanya.

LPDP, lanjut Netty, perlu mengevaluasi sistem rekrutmennya dengan menelusuri apakah ada calon penerima beasiswa selama ini yang dirugikan dengan pandangan subjektif semisal yang dimiliki Prof. Budi Santosa.

"Negara juga dirugikan jika ada calon mahasiswa brilliant

yang gagal memperoleh beasiswa karena penilaian subjektif seperti soal jilbab tersebut," imbuh Netty.

Oleh karena itu, Netty juga meminta pihak LPDP melakukan rekrutmen pewartawancara secara profesional dan bukan hanya sekadar rekomendasi.

"Para pewartawancara harus dibekali buku panduan standar yang berisi aturan dan prinsip yang tidak boleh dilanggar. Panduan tersebut tentu bersumber dari nilai-nilai universal Pancasila dan hukum positif yang berlaku di negara kita," lanjutnya.

Di akhir keterangannya, Netty meminta kepada para pihak untuk berhenti melakukan politik taste the water yang dapat menimbulkan kegaduhan publik.

"Marilah kita menjaga ketenangan dan kedamaian publik dengan tidak melontarkan hal-hal yang memancing polemik. Persoalan negara dan rakyat sudah amat banyak. Jangan habiskan energi dengan hal-hal seperti ini," tandas Netty

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

"Sebagai lembaga yang menjadi tumpuan banyak generasi muda untuk mendapatkan dukungan biaya pendidikan di perguruan tinggi berkualitas, seharusnya LPDP memastikan para pewartawancaranya adalah orang-orang berjiwa Pancasilais yang toleran, menghargai keyakinan agama seseorang dan objektif dalam menilai para calon penerima beasiswa."



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Penembakan Jurnalis Al-Jazeera oleh Zionis, Aleg PKS: Kejahatan Keji dan **Langgar Hukum Internasional**

KUTIPAN

Yogyakarta (12/05) --- Seorang jurnalis senior Al Jazeera Shireen Abu Akleh, tewas tertembak tentara Israel saat meliput bentrokan antara pasukan negara Zionis dengan warga Palestina di Kota Jenin tepi Barat pada Rabu (11/5).

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta mengemukakan keras tindakan keji pasukan zionis tersebut.

"Ini kejahatan yang sangat keji dan jelas-jelas melanggar hukum humaniter internasional. Setiap insan pers yang bertugas dan apalagi sudah menggunakan identitas pers, tidak boleh menjadi sasaran kekerasan oleh pihak manapun. Saya kira ada kesengajaan untuk melakukan pembunuhan terhadap wartawan sebagai upaya untuk menutupi fakta-fakta kejahatan yang dilakukan oleh tentara pendudukan Zionis

di wilayah Tepi Barat. Upaya yang sama juga pernah dilakukan oleh tentara Israel dengan melakukan pemboman terhadap kantor Al-Jazeera di Jalur Gaza yang juga menampilkan wartawan Associated Press (AP)," urai Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS lebih lanjut meminta pemerintah Indonesia untuk mendorong upaya penyelidikan secara menyeluruh dan transparan atas kasus pembunuhan jurnalis ini oleh otoritas Palestina dan pemerintah Israel dengan melibatkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

"Upaya penyelidikan atas

kasus pembunuhan ini penting untuk dilakukan, dan pelaku harus diberikan hukuman yang setimpal. Ini penting untuk dilakukan sehingga ada rasa aman bagi insan pers yang bertugas di lapangan. Dengan adanya kasus ini, PBB mestinya juga memberikan peringatan secara keras kepada pemerintah Zionis untuk menghentikan tindakan brutalnya kepada wartawan dan masyarakat sipil," jelas Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta menyatakan kekerasan di Palestina akan terus berlangsung selama Israel masih melakukan pendudukan terhadap wilayah-wilayah Palestina.

"Akar masalahnya penjajahan masih terus berlangsung. Maka kita sangat berharap pemerintah Indonesia terus mengupayakan melalui diplomasi internasional untuk mendorong kembali skema Solusi Dua Negara dan hadirnya kemerdekaan Palestina," tutup Sukamta.



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

“Upaya penyelidikan atas kasus pembunuhan ini penting untuk dilakukan, dan pelaku harus diberikan hukuman yang setimpal. Ini penting untuk dilakukan sehingga ada rasa aman bagi insan pers yang bertugas di lapangan. Dengan adanya kasus ini, PBB mestinya juga memberikan peringatan secara keras kepada pemerintah Zionis untuk menghentikan tindakan brutalnya kepada wartawan dan masyarakat sipil”

Maraknya Kasus Anak Kecanduan Gadget, Anggota FPKS Mengaku Prihatin

KUTIPAN

Jakarta (29/04) --- Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhul menyampaikan kecanduan gadget pada anak-anak sebagai salah satu dampak negatif dari era digital.

"Ini salah satu dampak dari Era Digital, yaitu semakin mudahnya anak-anak menggunakan smartphone atau gadget. Kita kerap melihat anak-anak usia SD hingga SMA asyik-masyuk bermain HP," ungkap Syaikhul dalam sambutannya di acara Webinar Aptika Kominfo dengan tema "Tips Mengatasi Anak Kecanduan Gadget dan Game Online.

Syaikhul mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya fenomena tersebut.

"Kasus-kasus anak kecanduan gadget semakin marak. Ini tentu saja memprihatinkan. Tak hanya dirasakan oleh kedua orangtua mereka, namun juga oleh kita karena ini berpotensi buruk terhadap masa depan bangsa," kata Syaikhul.

Syaikhul menyatakan kemajuan teknologi ini juga tidak dapat dihindari.

"Kemajuan teknologi tidak dapat kita hindari. Kita pasti akan menghadapinya, siap atau tidak siap. Seperti yang kita alami saat ini," jelas Syaikhul.

Syaikhul berharap dari terselenggaranya Webinar tersebut dapat menjadi bekal untuk dipraktikkan sebagai upaya mengatasi masalah kecanduan gadget pada anak.

"Melalui kegiatan ini, saya berharap ada bekal yang dapat dibawa pulang dan kemudian dipraktikkan dalam upaya mengatasi anak-anak yang kecanduan gadget," ujar Syaikhul.



H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Komisi I DPR RI

Kasus-kasus anak kecanduan gadget semakin marak. Ini tentu saja memprihatinkan. Tak hanya dirasakan oleh kedua orangtua mereka, namun juga oleh kita karena ini berpotensi buruk terhadap masa depan bangsa,"

Komisi II FPKS Desak Pemerintah **Buat Payung Hukum** Penetapan 272 Pejabat Kepala Daerah Sementara

KUTIPAN

Jakarta (13/05) --- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, **Mardani Ali Sera** menanggapi adanya kemungkinan lobi-lobi politik terkait dengan pengangkatan Pejabat Kepala Daerah (PKD) dalam Program Unggulan PKS Legislative Corner yang rutin digelar Fraksi PKS DPR RI, Jum'at, (13/05).

"Pendapat ada kepentingan politik tentu ada dasarnya. Karena namanya kepala daerah adalah jabatan politis dan selama ini karena berbasis Undang-undang Dasar Kepala Daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah sekarang ini ada pejabat sementara kepala daerah atau 'caretaker'. Selama ini memang sudah ada sebagai contohnya Jawa Barat," ujar Mardani.

Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta I ini menambahkan

untuk tahun 2022 ada sekitar 101 kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota dengan lima provinsi atau Gubernur yang sudah dilantik. Nanti tahun 2023 ada sekitar 171 Kepala Daerah, sehingga total ada 272 Kepala Daerah yang habis masa jabatannya.

"Ini masif jumlahnya dan lama waktunya sehingga siapapun yang punya kuasa sangat besar 'godaannya' sebagai orkestrasi politiknya. Apalagi diantara masa jabatan

kepala daerah ini ada momen penting Pemilu Legislatif 14 Februari 2024. Jadi Peluang Politisasi atau intervensi ada," ungkap Mardani.

Karena itu, kata Mardani, untuk menegakkan akuntabilitas, netralitas dan independensi sebaiknya Pemerintah membuat payung hukum bagi para pengganti Kepala Daerah ini.

"Maka di beberapa pendapat saya katakan bahwa lima pejabat Gubernur sementara yang baru dilantik ini rawan digugat, karena ditetapkan tidak mengikuti aturan Mahkamah Konstitusi yang mestinya di dahului dengan payung hukum pengangkatan tersebut," ujar Mardani.



Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

"Ini masif jumlahnya dan lama waktunya sehingga siapapun yang punya kuasa sangat besar 'godaannya' sebagai orkestrasi politiknya. Apalagi diantara masa jabatan kepala daerah ini ada momen penting Pemilu Legislatif 14 Februari 2024. Jadi Peluang Politisasi atau intervensi ada,"

Agar Peternak Tak Rugi

Atasi Segera Kasus Penyakit Mulut dan Kuku Hewan

Ditemukannya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha berpotensi merugikan peternak. Hewan ternak sehat milik peternak berpotensi tidak bisa dijual karena ketakutan masyarakat akibat PMK.



Johan : Pemerintah Harus Bertanggungjawab

"Saya berharap Pemerintah harus bertanggung jawab dengan adanya kebijakan impor daging sapi dan kerbau yang berasal dari negara-negara yang tidak bebas PMK, hal ini berakibat fatal bobolnya pertahanan PMK,"



Slamet: Harus Jadi Momentum Perbaikan

"Kondisi ini harus menjadi momentum untuk perbaikan sistem ke-karantina nasional terutama sistem perdagangan antar negara. Karena terkesan karantina untuk produk-produk impor hewan ikan dan tumbuhan sifatnya hanya formalitas saja."



Hermanto: Perlu Sertifikat Gratis Bagi Peternak

Agar peternak dengan hewan ternak sehat tidak dirugikan, Hermanto minta segenap jajaran yang menangani peternakan dan kesehatan hewan dari pusat hingga daerah bekerja cepat tapi cermat dan terukur dalam menentukan skala penyebaran PMK. Keluarkan sertifikat gratis bagi hewan ternak layak kurban sebagai jaminan keamanan untuk peternak dan konsumen,"



Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Masuk Indonesia, Anggota FPKS Nilai Pemerintah Sembrono

KUTIPAN

Jakarta (11/05) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet meminta Pemerintah untuk tidak menganggap remeh munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dilaporkan telah menyerang beberapa hewan ternak di Aceh dan Jawa Timur.

Menurut Slamet, laporan terkait penularan PMK pada hewan ternak menunjukkan ada yang salah dalam sistem karantina hewan yang dilakukan selama ini.

"Padahal karantina merupakan benteng terakhir pemerintah sehingga PMK tidak kembali masuk ke Indonesia," pungkaskanya.

Ketua Kelompok Komisi (Poksi) IV dari Fraksi PKS ini menegaskan bahwa salah satu asas penting dari sistem kekarantinaan nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan adalah asas keamanan nasional.

"Sehingga pemerintah perlu lebih jeli lagi melihat sisi lain dari muncul kembali PMK," tegas Slamet.

Perlu diingat, imbuhnya, penyakit ini telah lama dinyatakan hilang dari Indonesia.

"Sehingga tiba-tiba merembaknya kembali PMK ini perlu diwaspadai adanya upaya pihak luar untuk semakin melemahkan industri peternakan di dalam negeri," ujarnya.

Hal tersebut, kata Slamet, juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang terkesan sembrono dengan melakukan impor daging sapi dari negara-negara yang tidak bebas PMK seperti India.

"Pemerintah jangan hanya berpikir mendapatkan keuntungan dari para pengusaha saja, lalu mengabaikan kepentingan peternak kita," tegasnya di Jakarta Kamis (12/05).

Di sisi lain, Slamet juga menegaskan kondisi ini harus menjadi momentum untuk perbaikan sistem kekarantinaan nasional terutama sistem perdagangan antar negara. Karena terkesan karantina untuk produk-produk impor hewan ikan dan tumbuhan sifatnya hanya formalitas saja.

"Meskipun PMK telah terbukti tidak menular ke manusia (Non zoonosis) namun yang harus diperhatikan lebih dalam lagi adalah terkait dampaknya terhadap ketahanan pangan dan keanekaragaman hayati," katanya.

Menurut ketua Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) ini, jika PMK tidak segera dikendalikan maka akan mengancam populasi hewan ternak di Indonesia yang pada akhirnya akan merugikan peternak karena akan banyak



drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

“Laporan terkait penularan PMK pada hewan ternak menunjukkan ada yang salah dalam sistem karantina hewan yang dilakukan selama ini. Padahal karantina merupakan benteng terakhir pemerintah sehingga PMK tidak kembali masuk ke Indonesia”

hewan ternak yang mati akibat penyakit tersebut.

"Kekhawatiran selanjutnya adalah potensi PMK menyerang hewan-hewan liar seperti rusa,

kerbau, babi dan yang lainnya. Jika ini terjadi maka akan mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia," tutup Slamet.



Anggota FPKS Minta Pemerintah **Antisipasi Ancaman Berlapis Soal Pangan dan Energi**

KUTIPAN

Kabupaten Bone (11/05) --- Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mengatakan, saat ini pemerintah mesti terus waspada pada situasi dunia yang terus bergejolak yang mengakibatkan pada terganggunya proses produksi pangan dan penyediaan energi untuk kebutuhan dalam negeri.

"Saat ini ancaman berlapis pada persoalan pangan dan energi sudah di depan mata. Kita harus mampu melalui semua ini dengan berbagai persiapan. Baru baru ini sudah tersebar kembali di tanah air penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak terutama sapi. Situasi perubahan iklim yang drastis dan juga ekstrim juga telah terjadi. Perang yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina tidak kunjung reda. Semua ini sangat mempengaruhi negara kita yang ujungnya selain pangan dan energi, merambat ke semua komoditas yang melonjak

harganya", tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, hingga pasca lebaran idul fitri tahun 2022 ini, beberapa harga komoditas pangan masih belum kunjung untuk turun.

"Ini juga terjadi pada harga-harga bahan bakar yang implikasinya sangat mempengaruhi tingginya distribusi," ungkapnya.

Politisi PKS ini mengingatkan, bahwa semua komoditas yang berasal dari impor baik itu bahan baku maupun bahan langsung pakai, akan melonjak harganya.

"Yang perlu diantisipasi

adalah bahan baku dimana produksi yang akan digunakan untuk produksi penunjang peningkatan produksi pertanian seperti pupuk juga terancam akan naik bahkan langka keberadaannya," tutur Akmal.

Padahal, tambah Akmal, saat ini kontribusi pupuk sangat mempengaruhi tercapainya produksi pertanian sehingga dapat mengurangi angka impor/bahan pangan pokok seperti beras.

"Harus sentiasa waspada. Meski saat ini produksi pupuk misal NPK bisa mencapai 2,7 juta ton hingga 3,2 juta ton, akan tetapi kalau bahan baku sulit didapat, bukan saja mahal nantinya, tapi bisa langka seperti halnya minyak goreng saat ini", kata Akmal mengingatkan.

Anggota Fraksi PKS ini tetap mengapresiasi kinerja kementerian pertanian yang terus meningkatkan produksi pangan meski Indonesia dan Dunia masih dalam suasana pandemi Covid-19. Bahkan sektor pertanian menjadi kunci penting dalam mengendalikan inflasi karena sangat kokoh



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Salah satu bentuk kewaspadaan negara dalam mengantisipasi guncangan pangan dan energi, Pemerintah sudah mulai memikirkan pada peningkatan pendanaan sektor pertanian yang berorientasi peningkatan produksi yang maksimal

dalam mempertahankan ekonomi negara yang sedang terpuruk.

"Salah satu bentuk kewaspadaan negara dalam mengantisipasi guncangan pangan dan energi, Pemerintah sudah mulai memikirkan pada peningkatan pendanaan sektor pertanian yang berorientasi peningkatan produksi yang

maksimal. Selama ini APBN pertanian sudah berkurang drastis sejak tahun 2020, jadi untuk perencanaan tahun 2023, mesti ada peningkatan anggaran pertanian yang ditunjukkan pada pengembalian APBN kementerian seperti tahun 2015", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Hermanto Sampaikan Bela Sungkawa Atas Terbakarnya Puluhan Kapal Ikan di Cilacap

KUTIPAN

Padang (08/05) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto menyatakan kesedihan mendalam atas terbakarnya 54 kapal ikan di Pelabuhan Pelabuhan Wijayapura, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah kemarin.

Hermanto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Puluhan kapal ikan terbakar dalam sekejap sungguh menyedihkan. Jangan sampai terjadi lagi," tandas Hermanto dalam keterangannya, Sabtu (07/05/2022).

Lebih jauh Hermanto menyebutkan, lahan pertanian di daratan semakin menyempit maka sektor kelautan menjadi andalan penopang ekonomi pangan Indonesia dimasa mendatang.

"Untuk itu sektor kelautan

harus diperkuat, antara lain dengan memperbanyak armada kapal perikanan," ujar Legislator dari FPKS DPR RI ini.

Menurut Hermanto, kita masih butuh banyak tambahan kapal perikanan tangkap dan teknologi modern untuk nelayan dalam negeri agar bisa meraih berkah luasnya wilayah laut Indonesia.

"Ditengah upaya menambah kapal tersebut, tiba-tiba kita dikejutkan dengan kehilangan 54 kapal dalam sekejap. Sungguh ironi," keluhnya.

Dilaporkan, insiden kebakaran kapal perikanan di Pelabuhan Wijayapura diduga berawal dari adanya ledakan di

salahsatu kapal yang sedang melaksanakan perbaikan dan pencucian dinamo kapal. Ledakan mengakibatkan kapal tersebut terbakar.

"Karena tiupan angin kencang, api kemudian dengan cepat merambat ke kapal-kapal lain yang bersandar di sekitar dermaga. Sebanyak 547 awak kapal perikanan ikut terdampak insiden terbakarnya kapal perikanan tersebut," untkapnya.

Hermanto mendesak KKP agar segera merealisasikan bantuan untuk dapat meringankan beban para ABK tersebut.

"Bantu para ABK tersebut agar bisa bekerja kembali di kapal-kapal perikanan lainnya," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

“Kita masih butuh banyak tambahan kapal perikanan tangkap dan teknologi modern untuk nelayan dalam negeri agar bisa meraih berkah luasnya wilayah laut Indonesia. Ditengah upaya menambah kapal tersebut, tiba-tiba kita dikejutkan dengan kehilangan 54 kapal dalam sekejap”

Sesalkan Penangkapan Petani Sawit

Aleg PKS Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria

KUTIPAN

Jakarta (17/05) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan turut menyesalkan tindakan aparat keamanan yang menangkap puluhan petani kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Menurut Johan, tindakan ini malah memperuncing konflik lahan antara petani dan perusahaan yang telah berlangsung belasan tahun namun tak kunjung selesai.

“Atas kejadian ini, saya mendesak Pemerintah harus hadir menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh khususnya yang terjadi di sektor perkebunan, sebab Pemerintah harus sadar bahwa 60% konflik agraria terjadi di sepanjang Pulau Sumatera dan Pulau lainnya”, ucap Johan.

Politisi PKS ini menyebutkan bahwa seringkali upaya penyelesaian sengketa lahan selalu gagal, bahkan seringkali petani mendapatkan kekerasan dan perlakuan yang tidak adil

karena bargaining yang lemah dibanding perusahaan yang punya kuasa modal.

Maka Johan berharap Pemerintah dapat berlaku adil pada petani dan meminta aparat untuk bisa bersikap lebih manusiawi kepada petani karena mereka seringkali menjadi korban dalam situasi konflik lahan ini, ujarnya.

Johan menilai kasus lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang terjadi di Bengkulu ini akibat lahan yang telah dikelola oleh petani sawit diambil alih oleh perusahaan melalui keterangan akta pinjam pakai sehingga memunculkan konflik tanpa penyelesaian.

“Kasus di Bengkulu ini merupakan contoh dari sekian banyak kasus penguasaan lahan oleh perusahaan pemilik modal dengan masyarakat yang

berprofesi sebagai petani sawit”, tutur Johan.

Legislator Senayan ini berharap Pemerintah bisa mengurangi benang kusut penyebab konflik dan selalu menghadirkan sikap yang adil bagi petani dan pihak mana pun serta membantu petani karena mereka membutuhkan lahan untuk perkebunan sawit dan berupaya meningkatkan sumbangsih perusahaan pada desa penyangga dan masyarakat sekitarnya.

“Saya menilai akar konflik ini terjadi akibat adanya kepemilikan lahan yang dianggap ditelantarkan dan belum digarap serta kegagalan mekanisme proses ganti rugi dari lahan yang menjadi sengketa, maka Tindakan menangkap massal para petani sawit adalah Tindakan gegabah dan sembrono dengan tuduhan pencurian Ketika petani panen di lahan konflik, untuk itu pemerintah harus segera hadir membantu proses penyelesaian konflik ini” demikian pinta Johan Rosihan.

**H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**

Anggota Komisi IV DPR RI

“Atas kejadian ini, saya mendesak Pemerintah harus hadir menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh khususnya yang terjadi di sektor perkebunan, sebab Pemerintah harus sadar bahwa 60% konflik agraria terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit dengan luasan lahan yang cukup besar dan selalu terjadi di sepanjang Pulau Sumatera dan Pulau lainnya”



Soal Penangkapan Petani Sawit di Bengkulu

Pemerintah Harus Selesaikan Konflik Agraria



Saya menilai akar konflik ini terjadi akibat adanya kepemilikan lahan yang dianggap ditelantarkan dan belum digarap serta kegagalan mekanisme proses ganti rugi dari lahan yang menjadi sengketa, maka Tindakan menangkap massal para petani sawit adalah Tindakan gegabah dan sembrono dengan tuduhan pencurian. Ketika petani panen di lahan konflik, untuk itu pemerintah harus segera hadir membantu proses penyelesaian konflik ini”



**H. JOHAN
ROSIHAN, S.T.**
Anggota Komisi IV DPR RI



Macet dan Siaga Bencana saat Mudik, Anggota FPKS: Merak-Bakauheni Perlu Perhatian Serius

KUTIPAN

Surabaya (28/04) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo meminta pemerintah memberi perhatian serius pada penyeberangan Merak-Bakauheni selama mudik Lebaran 2022.

Menurut Sigit, tak hanya soal kemacetan dan keselamatan, tapi juga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tsunami akibat letusan gunung Anak Krakatau.

"Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah mengeluarkan peringatan tentang ancaman tsunami seiring dengan meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan ini berdampak pada kelancaran dan keselamatan di penyeberangan Merak-Bakauheni. Karena itu, saya minta pemerintah memberi perhatian serius di Merak. Bukan hanya bagaimana mengurai kemacetan yang sudah terjadi sejak Rabu (27-4), tapi juga bersiap siaga atas

kemungkinan terjadi tsunami," Kata Sigit, Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

Tak hanya kepada pemerintah, Sigit pun meminta masyarakat dan pemudik mewaspadai ancaman terjadinya tsunami pada malam hari. Sigit menganjurkan pemudik untuk melakukan penyeberangan di siang hari.

Sementara itu, untuk mengatasi kemacetan di Bakauheni, Sigit berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan ASDP berkoordinasi untuk membahas kemungkinan penambahan jadwal penyeberangan dengan menambah armada kapal feri yang melayani penyeberangan di Selat Sunda ini.

"Jumlah kapal yang dioperasikan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak berjumlah 27 kapal dari 68 kapal yang siaga atau naik 17% dari tahun 2019. Sementara, di hari Selasa lalu saja pemudik dengan kendaraan pribadi sudah melonjak lebih dari 42%. Ini artinya, antrean mendapat kapal untuk menyeberang akan panjang dan macet. Untuk tiket hari Kamis ini saja sudah habis terjual dan baru tersedia untuk keesokan harinya. Karena itu, ini harus menjadi perhatian serius." Kata Sigit.

Seperti diketahui, sejak Rabu dini hari kemacetan dan antrean panjang sudah terjadi di Merak. Pemudik rela antri hingga 5 jam untuk bisa masuk ke pelabuhan. Akibatnya, banyak pemudik yang tiketnya hangus karena terlambat check in di pelabuhan.

"Saya mendapat laporan banyak pemudik yang tiketnya hangus karena terlambat check in di pelabuhan akibat terjual macet. Mohon ini menjadi perhatian dan dicarikan solusinya. Jangan sampai pemudik dirugikan," Kata Sigit.



Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

"Jumlah kapal yang dioperasikan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak berjumlah 27 kapal dari 68 kapal yang siaga atau naik 17% dari tahun 2019. Sementara, di hari Selasa lalu saja pemudik dengan kendaraan pribadi sudah melonjak lebih dari 42%. Ini artinya, antrean mendapat kapal untuk menyeberang akan panjang dan macet. Untuk tiket hari Kamis ini saja sudah habis terjual dan baru tersedia untuk keesokan harinya. Karena itu, ini harus menjadi perhatian serius"



Dinilai Beratkan Masyarakat, Aleg PKS Minta Kemenhub Lupakan Wacana Kenaikan Tarif KRL

KUTIPAN

Tasikmalaya (17/05) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, sangat menyayangkan ketika Pelaksana Tugas Kepala Sub Direktorat Penataan dan Pengembangan Jaringan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengemukakan tentang usulan kenaikan tarif KRL dalam sebuah diskusi.

“Apa yang dikemukakan pejabat Kemnehub tersebut tidak selaras dengan yang pernah disampaikan Juru Bicara Kemnehub pada awal Maret lalu. Bahwa implementasi penyesuaian tarif KRL tidak akan dilakukan sebelum puasa dan Lebaran. Kemudian kenaikan ini pun akan dikaji kembali setelah lebaran. Jadi, harusnya dikaji dulu,” Kata Politisi PKS ini.

Atas kondisi tersebut, Toriq menganggap komunikasi terkait wacana penyesuaian tarif KRL antar pejabat di Kemenhub

tidak solid.

Sebagai mitra kerja, Toriq meminta hasil kajian terbaru. Bukan hanya hasil survey kemampuan membayar (ability to payment) dan kesediaan pengguna untuk membayar (willingness to pay) kereta api wilayah perkotaan yang lalu saja.

“Kami sebagai wakil rakyat yang memiliki tugas controlling dan budgeting berhak tahu proyeksi peningkatan layanan, kapasitas dan fasilitas kereta apa saja yang akan dilakukan oleh PT KAI ketika tarif KRL akan

dinaikkan. Benarkah penyesuaian tarif akan menambah ketiganya? Padahal ketika tarif tidak naik sejak 2015, terus terjadi perbaikan yang signifikan,” tuturnya.

Menurut Toriq, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan tarif dasar KRL Commuter Line karena berbagai pertimbangan seperti naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng dan BBM. Selain itu, ujar dia, daya beli masyarakat yang ada di berbagai daerah saat ini dinilai masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19.

“Untuk Sementara waktu sebaiknya Kemenhub juga PT. KAI melupakan wacana Kenaikan Tarif KRL. Sebaiknya fokus menjaga pelayanan yang sudah ada dengan anggaran yang diberikan. Sehingga pengguna KAI Commuter Line Jabodetabek bertambah. Setelah turun hampir 20 persen akibat pandemi,” tutupnya.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

“Untuk Sementara waktu sebaiknya Kemenhub juga PT. KAI melupakan wacana Kenaikan Tarif KRL. Sebaiknya fokus menjaga pelayanan yang sudah ada dengan anggaran yang diberikan. Sehingga pengguna KAI Commuter Line Jabodetabek bertambah. Setelah turun hampir 20 persen akibat pandemi”



Kisruh Pengalihan Saham PT Freeport, Aleg PKS: Berikan Hak Masyarakat Papua

KUTIPAN

Jakarta (15/05) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta pemerintah segera memberikan hak masyarakat Papua terkait kepemilikan saham di PT Freeport.

Menurut Amin, pengalihan saham ke pihak Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika sebaiknya tidak ditunda-tunda jika memang tahapan prosedurnya sudah kelar.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu menanggapi isu kekisruhan terkait pengalihan saham PT Freeport yang menjadi bagian Pemprov Papua dan Pemkab Mimika.

“Karena saat ini pembentukan BUMD Papua sudah selesai, Mind ID bisa segera bertemu dengan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, untuk membahas masalah ini dan berkoordinasi terkait proses

pengalihan saham tersebut. Jangan sampai kesimpangsiuran proses pengalihan saham terus berlanjut sehingga merugikan semua pihak”, tegasnya.

Berdasarkan hasil divestasi saham Freeport dari PT Freeport McMoran teres pemerintah RI, disepakati PT Industri Papua Metal dan Mineral (IPMM) memperoleh 25% saham PT Freeport.

Pemegang saham PT IPMM adalah 60% PT MIND ID dan 40% BUMD yang dibentuk oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika sehingga kepemilikan saham BUMD Papua di PT Freeport adalah 10% (dari 40%

saham di PT IPMM dikalikan 25% saham PT Freeport untuk PT IPMM).

“Peralihan kepemilikan saham ini juga terkait dengan pembagian dividen yang menjadi hak masyarakat Papua. Akan lebih bijak jika pembagian dividen tidak hanya dihitung pasca pengalihan saham secara resmi. Namun dihitung mundur ke belakang sejak kesepakatan pembagian saham pasca divestasi saham Freeport ditanda-tangani. Jika selama ini belum dibayarkan, secara akumulasi, MIND ID wajib membayarkan dividen yang menjadi hak masyarakat Papua,” kata Amin.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, proses serah terima kepemilikan saham PT Freeport ke Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika itu, secara teknis operasional diserahkan kepada dari MIND ID melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk bersama oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Untuk lebih mudahnya kami namakan BUMD Papua. Berdasarkan penjelasan dari manajemen MIND ID, kata Amin, serah terima kepemilikan saham akan dilaksanakan jika proses pembentukan BUMD Papua sudah selesai.

Terkait isu ini, mengingat BUMN termasuk Mind ID adalah mitra kerja Komisi VI DPR RI, tentu persoalan menjadi concern anggota Komisi VI DPR RI. Karena itu, Komisi VI perlu



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

“Peralihan kepemilikan saham ini juga terkait dengan pembagian dividen yang menjadi hak masyarakat Papua. Akan lebih bijak jika pembagian dividen tidak hanya dihitung pasca pengalihan saham secara resmi. Namun dihitung mundur ke belakang sejak kesepakatan pembagian saham pasca divestasi saham Freeport ditanda-tangani.

meminta penjelasan dari MIND ID maupun Kementerian BUMN terkait pengalihan saham ini.

“Kami ingin memastikan proses pengalihan saham berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah apapun

di lapangan. Kami berharap, persoalan ini diselesaikan secara baik untuk menghindari dampak sosial, ekonomi, maupun politik akibat berlarut-larutnya masalah ini,” pungkasnya.



60 Hari Adu Kuat Jokowi VS Pengusaha Migor, Aleg PKS: Jangan Korbankan Petani Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (12/05) --- Sejak diberlakukan larangan ekspor CPO dan turunannya dua pekan lalu, harga jual migor curah mulai bergerak turun.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) menyebutkan per tanggal 11 Mei 2022, harga migor curah sedikit turun menjadi Rp. 19.100,- per kilogram dari sebelumnya Rp. 20.100,- per kilogram. Namun, harga ini masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp. 15.500,- per kilogram.

Dalam proses penurunan harga migor agar sesuai HET, Mulyanto minta pemerintah meminimalisasi risiko kebijakannya bagi rakyat kecil, khususnya petani sawit rakyat. Para petani harus dibela dan diberi insentif selama pelarangan ekspor tersebut berlangsung. Jangan dibiarakan menjadi korban kebijakan Pemerintah.

"Insentif itu bisa berupa pembelian tandan buah segar

(TBS) oleh pemerintah untuk biofuel, insentif pupuk, dan berbagai insentif lainnya," terang Mulyanto.

Mulyanto memperkirakan adu kuat antara pemerintah dan pengusaha migor ini masih akan terus berlanjut hingga dua bulan ke depan.

Sebab daya tahan pengusaha migor bergantung pada kapasitas tangki penyimpanan dan pengolahannya (refinery). Para pakar menyebut rerata kapasitas penyimpanan sekitar 60 hari. Sedangkan kapasitas refinery bisa mencapai satu tahun.

"Jadi paling tidak, efek larangan ekspor CPO ini akan muncul secara signifikan pada 6 minggu ke depan. Itu waktu yang tidak pendek. Karena risiko yang harus ditanggung dari kebijakan larangan CPO

tersebut sangat mahal," imbuh Mulyanto.

Untuk itu Mulyanto mendesak Presiden Jokowi dan jajaran menteri agar bekerja ekstra keras. Jangan business as usual. Setiap hari 'argometer' risiko kebijakan jalan terus.

Untuk diketahui, harga TBS petani rakyat sudah anjlok. Di Riau, sebagai daerah lumbung sawit nasional, Tim Penetapan harga TBS untuk periode 11 - 18 Mei 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10 - 20 tahun turun Rp 972,29 per kg menjadi Rp 2.947,58 per kg. Bisa dibayangkan harga TBS untuk daerah-daerah lain yang tidak punya program kemitraan sawit. Total petani sawit sekitar 2,67 juta kepala keluarga (Kementan, 2021).

Sementara devisa negara hilang sebesar Rp. 27 triliun per bulan atau sekitar Rp. 1 triliun per hari dari ekspor sawit. Belum lagi lunturunya kepercayaan mitra dagang luar negeri kita, karena kebijakan radikal yang diputuskan Presiden tersebut. Termasuk kekhawatiran nasib 16,2 juta pekerja industri sawit.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"Para petani harus dibela dan diberi insentif selama pelarangan ekspor tersebut berlangsung. Jangan dibiarkan menjadi korban kebijakan Pemerintah. Insentif itu bisa berupa pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pemerintah untuk biofuel, insentif pupuk, dan berbagai insentif lainnya,"

Kritik Larangan Ekspor CPO, Politisi PKS: Langkah Sembrono dan Tak Solutif

KUTIPAN

Jakarta (30/04) --- Fraksi PKS DPR RI menyesalkan ketidakkonsistenan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait upaya menjamin ketersediaan minyak goreng dan menstabilkan harga minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter.

"Yang pertama dari segi konten yaitu berbagai ralat tentang isi kebijakan, terutama apa saja yang dilarang ekspor. Yang awalnya CPO (minyak sawit mentah) dilarang ekspor, ternyata hanya bahan baku minyak goreng (RBD Palm Olein) saja yang dilarang. Lalu kemudian ada ralat berikutnya bahwa memang CPO yang dilarang ekspor," kata Anggota DPR RI FPKS Rofik Hananto.

Dalam konferensi pers pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) tidak termasuk dalam komoditas yang masuk dalam larangan ekspor.

Airlangga pada awalnya

mengungkapkan, larangan ekspor hanya berlaku untuk bahan baku minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein). Sementara CPO dan produk turunannya seperti Red Palm Oil (RPO) masih diperbolehkan ekspor.

Belakangan, pemerintah meralat aturannya, di mana dalam konferensi pers terbaru esok harinya, Airlangga menegaskan bahwa CPO juga termasuk ikut dilarang.

"Seluruhnya sudah tercakup dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan akan dilakukan malam hari ini pukul 00.00 WIB tanggal 28 April karena ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh

Bapak Presiden," kata Airlangga, Kamis (28/4/2022).

Hal ini, menurut Rofik, mengakibatkan pemangku kepentingan di industri minyak goreng gagal memahami kebijakan pemerintah. Salah satu yang kena getahnya adalah adanya laporan pabrik kelapa sawit (PKS) mulai menolak hasil buah sawit petani.

Kemudian dari segi pembawa berita dari Pemerintah, mulai dari Presiden dan Menko Perekonomian yang isi pesannya berbeda. Hal ini menunjukkan adanya tidak adanya kerjasama dan komunikasi yang tuntas di antara penyelenggara negara.

"Ada baiknya ketika Presiden dan Menteri terkait seperti Menko Perekonomian, Menperin, dan Mendag berada dalam satu forum ketika menyampaikan kebijakannya, sehingga langsung bisa dikomunikasikan detail pelaksanaan kebijakannya," ujar anggota Komisi VII DPR RI itu.

Yang lebih parah lagi adalah Pemerintah terkesan sembrono dalam menetapkan kebijakan publik. Pelarangan ekspor ini apapun bentuknya adalah bertolak belakang



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

"Apa kata dunia kalau CPO ini dilarang diekspor. Karenanya pelarangan ekspor ini dapat dipandang cuma sekadar gimmick untuk meraih simpati publik dan upaya menutupi kekurangan pemerintah dalam kemampuannya mengeksekusi kebijakan. Oleh karena itu stop mempermainkan rakyat dan mulai membuat kebijakan yang realistis dan solutif"

dengan kebijakan ekonomi di dunia yang sudah meng-global saat ini. Tidak ada satu negara pun yang tidak membutuhkan negara lain dalam memenuhi kebutuhannya. Apalagi produk CPO ini adalah komoditas yang

sudah diperdagangkan secara internasional selama ini. Rofik menilai kebijakan ini tidak solutif.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Live Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



Kritisi Istilah Subsidi Haji dan Bantuan Sosial,

HNW: Tak Sesuai UU, Bisa Timbulkan Salah Persepsi

KUTIPAN

Jakarta (29/04) — Anggota Komisi VIII DPR-RI sekaligus Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi penggunaan istilah subsidi haji dalam pengelolaan keuangan haji dan istilah bantuan sosial dalam program penangananan fakir miskin.

HNW sapaan akrabnya menegaskan bahwa kedua istilah tersebut tidak terdapat baik di UUD NRI 1945 maupun UU terkait, yang bisa memunculkan salah persepsi seolah-olah Negara memsubsidi jemaah untuk biaya naik haji dan membantu Rakyat, sehingga mengesankan hubungan yang timpang antara negara dan rakyat.

"Padahal sejatinya uang yang dibayarkan untuk biaya ibadah haji adalah dana jemaah haji sendiri bukan dari APBN, dan sesuai Pembukaan UUDNRI 1945, negara memang berkewajiban (bukan sekedar

membantu) untuk melindungi seluruh Rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum," ungkapnya.

Sudah seharusnya, kata HNW, salah kaprah penggunaan istilah seperti 'subsidi haji' dan 'bantuan sosial' dikoreksi, dan diganti dengan istilah lain yang lebih sesuai dengan UU dan fakta lapangan.

"Misalnya bisa digunakan istilah 'distribusi nilai manfaat' untuk pengelolaan keuangan haji dan istilah 'jaminan sosial' serta 'transfer tunai' untuk program penangananan fakir miskin," disampaikan Hidayat dalam keterangannya di

Jakarta, Jum'at (29/04).

HNW yang merupakan Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menilai, penggunaan istilah subsidi dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji yang masih digunakan dalam keterangan terbaru BPKH (25/4/2022) berakar dari ketidakmampuan Pemerintah untuk mencapai tingkat pengembalian (return) standar dalam mengelola keuangan haji.

Jika return setoran awal jamaah bisa mencapai rata-rata 6% per tahun saja, imbuhnya, maka selama menunggu antrean/waktu tunggu menuju berangkat haji, misalnya 25 tahun, maka dana tersebut akan berkembangan menjadi lebih dari Rp 80 juta, jumlah yang sangat cukup untuk ongkos haji, bahkan masih ada kembaliannya.

"Namun, ketidakmampuan mencapai return standar tersebut menyebabkan hasil nilai manfaat harus didistribusikan dari jamaah tunggu kepada jamaah berangkat. Tetapi sekalipun demikian, distribusi tersebut tetap murni berasal dari uang jamaah haji, bukan merupakan subsidi negara, sehingga tidak layak disebut sebagai subsidi," lanjutnya.

Apalagi menurut data daftar tunggu calon jemaah haji yang dikeluarkan oleh Ditjen PHU Kemenag tahun 2021, rata-rata jadwal tunggu calon jemaah haji untuk berangkat haji yang tercepat 14 tahun dan paling lambat 36 tahun, maka



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Program-program Kementerian Sosial selama ini juga bukan merupakan bantuan baik dari Menteri maupun Presiden, melainkan bersumber dari APBN yang dibiayai oleh pajak rakyat. Dan itu sesungguhnya merupakan pelaksanaan atas kewajiban negara melindungi dan memakmurkan seluruh Rakyat Indonesia.

bila dibuat rata-rata, jadwal tunggu keberangkatan adalah 25 tahun.

Tapi dengan terjadinya 2 tahun tidak ada pemberangkatan, dan tahun ini kuota haji untuk Indonesia hanya sekitar 50% saja, tentu waktu tunggu bagi calon haji yang sudah setor biaya ibadah haji ke Bank hingga tahun 2022 yang berjumlah 5,1 juta calon

jemaah, akan semakin lama, tetapi nilai manfaatnya juga jadi bertambah lebih besar lagi. Terbukti dana kelola haji oleh BPKH meningkat drastis dari Rp 124,3 T pada tahun 2019, menjadi Rp 158,8T pada tahun 2021. Artinya istilah subsidi akan semakin tidak tepat kedepannya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS Minta KemenPPA Lebih Fokus terhadap Kasus Pembunuhan Anak Usia Dini

KUTIPAN

Medan (13/05) -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis meminta kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPA) untuk lebih fokus dalam penanganan kasus pembunuhan pada anak usia dini.

"Seiring maraknya terjadi kasus pembunuhan pada anak usia dini dengan rentang umur dibawah 10 tahun, maka saya minta dengan tegas kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar lebih mendalami lagi motif-motif apa saja yang akan difokuskan dalam kasus pembunuhan anak ini," tegas Iskan.

Dalam kasus pembunuhan pada anak ini, lanjutnya, di tahun ini sudah marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

"Hal ini tentu saja membuat kita sama-sama geram dan ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, maka untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak fokuskan serta dalam motif apa

saja pada kasus pembunuhan anak ini", ujar Iskan.

Anggota Legislatif asal Sibuhuan ini juga menambahkan terkait Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar bisa segera memberikan sosialisasi dan penyuluhan untuk masyarakat kita.

"Terkait maraknya terjadi kasus pembunuhan yang terjadi pada ibu ke anak akhir-akhir ini tentu saja kita tidak bisa tinggal diam khususnya kepada anak-anak kita yang harus mendapatkan perhatian yang khusus dari instansi terkait, pada tahun 2022 ini setidaknya sejumlah kasus pembunuhan terhadap anak mulai dari bulan Maret di Brebes, April di Bandung dan Mei ini terjadi di

Semarang, dengan penyebab kasus pembunuhan itu adalah Ibu kandung si anak tersebut, maka dari itu saya meminta kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini harus segera melakukan kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada ibu-ibu di negara kita ini," sebut Iskan.

Agar nantinya, lanjutnya, para orang tua masyarakat kita bisa memahami terlebih untuk membimbing serta merawat anak-anak kita dengan Akhlak yang terpuji.

"Kasus yang terjadi pada anak akhir-akhir ini tentu perbuatan yang sangat keji ini kita hentikan segera mungkin dengan melakukan pengawasan untuk anak-anak bangsa ini, sungguh mereka tidak lah lepas dari bimbingan para orang tua nya. Oleh karena itu Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak dapat hadir di tengah marak nya kasus pembunuhan yang terjadi pada anak-anak bangsa kita ini", tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga menambahkan kita para orang tua harus bisa membimbing kepada anak-anak kita dengan hal yang baik serta akhlak yang

**H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.**

Dapil Sumatera Utara II

"Diharapkan nantinya para orang tua di negara kita ini dapat memahami agar bisa membimbing anak-anak mereka dengan baik serta tidak adanya terulang kembali kasus pembunuhan terhadap anak di Indonesia",

terpuji.

"Seperti yang saya lihat minggu ini kembali terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan seorang ibu kepada anaknya di daerah Semarang Jawa Tengah. Hal ini tentu saja membuat saya geram dan ini tidak bisa dianggap enteng sebelah mata, maka kementerian pemberdayaan perempuan dan anak disini saya minta untuk

bisa mengurai kasus pembunuhan yang terjadi pada anak-anak ini dan khusus nya kepada orang tua kita bisa ajak sosialisasi dengan mengadakan agenda penyuluhan terkait topik seperti maraknya kasus pembunuhan yang terjadi pada anak," pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Data Penyumbang Kasus HIV dari Penyimpangan Seksual Terus Meningkat

KUTIPAN

Jakarta (15/05) — Data Penyumbang Kasus HIV dari kelompok Lelaki Seks Lelaki (LSL) dan transgender terus meningkat. Menurut data UNAIDS pada 2019, populasi penderita HIV baru dari kalangan LSL dan transgender mencapai 18 persen.

Sementara peningkatan risiko tertular HIV terbesar adalah kelompok LSL (22 kali) sementara kelompok transgender memiliki potensi risiko tertular 12 kali.

Sementara jumlah kasus HIV di Indonesia menurut faktor risiko menunjukkan bahwa LSL menyumbang sebanyak 506 kasus pada tahun 2010 dan 555 kasus pada tahun 2011, terjadi peningkatan sebanyak 49

kasus (Kemenkes RI, 2011). Berdasarkan pemodelan matematik epidemi HIV di Indonesia 2010-2025 dengan menggunakan data demografi, perilaku dan epidemiologi pada populasi utama oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional,

diproyeksikan akan terjadi peningkatan kasus HIV yang signifikan pada seluruh kelompok LSL.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati menyebut berbagai data peningkatan faktor risiko penularan HIV/AIDS dari kelompok LSL yang masuk dalam kelompok LGBT harus diwaspadai keluarga Indonesia.

Kewaspadaan ini dalam rangka menekan salah satu penyakit menular yang menjadi concern bukan hanya Indonesia tapi juga dunia.

"Kewaspadaan keluarga Indonesia terhadap perilaku LGBT karena memiliki faktor risiko penularan yang tinggi dalam penyebaran HIV/AIDS.

Lindungi anak-anak kita agar jauh dari tindakan penyimpangan seksual yang berpotensi memiliki faktor risiko tinggi penularan HIV," kata Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini dalam keterangannya, Sabtu (14/5/2022).

Kewaspadaan ini, papar Kurniasih, termasuk dengan melindungi dari konten-konten yang mempromosikan tindakan LGBT secara terbuka lewat media termasuk media sosial.

"Adanya konten-konten yang secara terbuka mempromosikan tindakan LGBT bagi masyarakat Indonesia adalah konten yang harus diwaspadai. Selain meminimalkan faktor risiko penularan HIV/AIDS juga karena tindakan LGBT tidak sesuai dengan norma kebudayaan masyarakat di Indonesia," ungkap Kurniasih.

Kurniasih mengatakan, tindakan LGBT tidak diterima oleh masyarakat Indonesia tercermin dari massifnya protes publik terhadap salah satu konten kreator yang mengangkat perbincangan oleh pelaku LGBT yang hidup di luar negeri.

"Publik yang merespons negatif hingga yang bersangku-



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Adanya konten-konten yang secara terbuka mempromosikan tindakan LGBT bagi masyarakat Indonesia adalah konten yang harus diwaspadai. Selain meminimalkan faktor risiko penularan HIV/AIDS juga karena tindakan LGBT tidak sesuai dengan norma kebudayaan masyarakat di Indonesia"

tan menurunkan videonya adalah sikap publik yang tidak menerima perilaku LGBT di tengah-tengah masyarakat Indonesia," tegas Kurniasih.

Fraksi PKS, ujar Kurniasih, sebelumnya juga meminta agar

ada peraturan komprehensif yang mengatur bukan hanya kekerasan seksual tapi juga tindakan penyimpanan seksual.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hepatitis Misterius, Politisi PKS: **Gencarkan** Penelitian dan Pemeriksaan Spesimen

KUTIPAN

Jakarta (08/05) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani meminta Pemerintah agar menggenarkan penelitian dan pemeriksaan spesimen terkait fenomena hepatitis misterius di Indonesia.

"Pemerintah harus menggenarkan penelitian dan pemeriksaan penyebab munculnya penyakit tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya. Hal ini penting dilakukan agar kita tidak salah langkah dalam mengantisipasi penyebaran hepatitis misterius yang sudah menyerang banyak negara ini," kata Netty dalam keterangan medianya, Minggu, (08/05).

Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini juga meminta pemerintah agar memberikan informasi yang jelas pada masyarakat.

"Edukasi masyarakat untuk tidak panik dan meningkatkan kewaspadaan. Optimalkan fasilitas, sumber daya dan

perangkat pemerintah yang tersedia untuk memberikan informasi yang benar dan jelas pada masyarakat," katanya.

Penjelasan gamblang, kata Netty, harus diberikan pada masyarakat agar seluruh elemen bangsa menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran penyakit tersebut.

"Penting untuk menginformasikan peta penyebaran kasus, upaya yang dilakukan pemerintah dan kesiapan sistem kesehatan dalam melakukan antisipasi lonjakan kasus agar rakyat dapat berpartisipasi aktif melakukan pencegahan," katanya.

Lebih lanjut Netty meminta

pemerintah agar mengantisipasi beredarnya informasi hoax tentang penyakit hepatitis ini yang dapat memicu kepanikan di masyarakat.

"Misalnya, informasi hubungan penyakit ini dengan vaksin Covid-19 yang cukup ramai diperbincangkan," ungkapnya.

Selain itu, imbuhnya, fasilitas serta tenaga kesehatan juga harus disiapkan.

"Kita tidak berharap kasus hepatitis misterius ini semakin meningkat, akan tetapi fasyankes dan nakes harus siaga dengan langkah antisipatif."

Sebagaimana diberitakan, pada 1 Mei 2022, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait adanya 228 kasus hepatitis yang terjadi di 20 negara. Hingga saat ini, WHO dan banyak negara masih melakukan investigasi terhadap penyebab dan perkembangan penyakit hepatitis misterius tersebut.



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

"Penjelasan gamblang harus diberikan pada masyarakat agar seluruh elemen bangsa menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran penyakit tersebut. Penting untuk menginformasikan peta penyebaran kasus, upaya yang dilakukan pemerintah dan kesiapan sistem kesehatan dalam melakukan antisipasi lonjakan kasus agar rakyat dapat berpartisipasi aktif melakukan pencegahan"

QUOTE



Dipl.Ing. Diah Nurwitasari, M. I. POL.
Anggota Komisi VII DPR RI / Fraksi PKS

Berhijab

Justru Saat Kuliah di Jerman

Saya adalah penerima beasiswa dari program alm. Pak Habibie dulu, kuliah di Jerman. Justru interaksi saat di Jerman menghantarkan saya mendapatkan hidayah untuk berhijab tahun 1986. Alhamdulillah..

Selama saya kuliah Teknik Penerbangan dan kerja praktek di berbagai industri pesawat terbang, hijab justru dihargai masyarakat Jerman.

Jadi, sangat memprihatinkan jika seorang Rektor yang juga Guru Besar, sangat memandang sempit mereka yang berhijab..

Anggota FPKS Desak Kepolisian Panggil Rektor Perguruan Tinggi yang Unggah Ujaran Kebencian di Medsos

KUTIPAN

Jakarta (30/04) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menanggapi sikap dan pernyataan salah seorang Guru Besar yang juga Pimpinan Perguruan Tinggi di media sosial.

Menurut Fahmy, apa yang dilakukan Prof. Budi Santosa, PhD, melalui akun facebooknya telah menyampaikan pikiran, sikap, dan pernyataan yang sarat kebencian dan bernuansa pelecehan kepada umat Islam.

"Saya tidak habis mengerti, bagaimana mungkin seorang pendidik, bahkan seorang Guru Besar, dan juga seorang pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) bersikap dan bertindak provokatif merobek-robek kesatuan bangsa," ungkap Anggota Komisi X ini.

Dalam unggahannya di facebook, kata Fahmy, Budi Santosa selaku pewawancara calon mahasiswa penerima

beasiswa Pendidikan Tinggi (LPDP) menyuarakan kebenciannya terhadap istilah atau lafaz-lafaz yang biasa diucapkan oleh umat Islam, seperti insyaAllah, barakallah, qadarullah, dan sebagainya.

"Bahkan secara tersirat menyebut mahasiswa yang biasa mengenakan) tutup kepala sebagai manusia-manusia gurun yang otaknya tertutup," pungkasnya.

Bila benar isi pikiran, sikap, dan pernyataan terbuka yang sarat kebencian dan pelecehan bernuansa SARA itu dia yang mengunggahnya, kata Fahmy, maka sudah seharusnya Kemendikbud Ristek Dikti

segera menindaknya secara tegas.

Bahkan, tegasnya, sudah seharusnya pihak kepolisian menangkap dan memeriksanya dengan delik ujaran kebencian.

"Bila hal tersebut dibiarkan, saya khawatir masyarakat, khususnya kalangan umat Islam akan semakin apatis dan tidak percaya lagi kepada Pemerintah. Bahkan yang saya cemas, sikap dan perilaku ala komunis yang kerap menyerang agama, menimbulkan kegaduhan, dan memecah belah telah berkembang subur," ujar Anggota FPKS dari Dapil Jabar V ini.

Tentu saja bila dibiarkan demikian, lanjut Fahmy, maka bersiaplah untuk menghadapi protes masyarakat.

"Oleh sebab itu, sikap tegas pemerintah dan aparat penegak hukum (Kemendikbud Dikti dan Kepolisian) mesti segera ditunjukkan kepada publik," tutup Fahmy.



Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed
Anggota Komisi X DPR RI

“Bila hal tersebut dibiarkan, saya khawatir masyarakat, khususnya kalangan umat Islam akan semakin apatis dan tidak percaya lagi kepada Pemerintah. Bahkan yang saya cemas, sikap dan perilaku ala komunis yang kerap menyerang agama, menimbulkan kegaduhan, dan memecah belah telah berkembang subur”

Legislator PKS Desak Rektor ITK Ditindak Tegas Terkait 'Manusia Gurun'

KUTIPAN

Jakarta (04/05) --- Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah mendesak Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof Budi Santosa Purwokartiko ditindak tegas akibat dugaan ujaran bernada SARA. Ujaran diduga SARA dituangkan Budi Santosa dalam media sosialnya yang menyebut soal 'manusia gurun'.

Menurut Ledia, Rektor Budi sepatutnya telah mencederai nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, semangat NKRI dan amanah konstitusi dalam berbagai regulasi.

"Apa yang diungkap Rektor Budi Santosa jelas-jelas sebuah pelecehan pada nilai-nilai Pancasila terkait Ketuhanan, Keadilan dan Persatuan. Juga melecehkan nilai-nilai kebebasan melaksanakan nilai-nilai agama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, merusak sendi-sendi kesatuan dalam berbangsa dan mengabaikan berbagai amanat regulasi terkait pendidikan," ujar Ledia dalam keterangan, Ahad (1/5/2022).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai Budi Santosa menyuarakan pikiran dan perasaannya dengan kalimat yang tendensius dan melecehkan umat Islam secara umum dan muslimah secara khusus.

Menurutnya, pilihan kata-kata Prof Budi telah melecehkan umat Islam. Yakni pada kalimat 'Dari 14, ada 2 tidak hadir, jadi 12 mahasiswi yang saya wawancara, tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun'.

"Budi Santosa telah melecehkan muslimah. Ini jelas merupakan penyampaian ujaran kebencian dan pelecehan verbal terkait SARA

yang harus ditindak tegas baik oleh Kemendikbudristek maupun aparat kepolisian," tegas Ledia

la mengingatkan seorang pendidik seharusnya ikut mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar serta meneguhkan semangat persatuan dan penguatan karakter positif dalam keseharian.

"Sebagai seorang pendidik, Prof Budi justru telah mengkhianati tujuan pendidikan nasional," kecamnya.

Ledia menegaskan tujuan pendidikan nasional di Indonesia dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sementara menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 pasal 4, kedudukan seorang guru dan dosen sebagai tenaga



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

"Budi Santosa telah melecehkan muslimah. Ini jelas merupakan penyampaian ujaran kebencian dan pelecehan verbal terkait SARA yang harus ditindak tegas baik oleh Kemendikbudristek maupun aparat kepolisian,"

profesional adalah bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut.

Ledia meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim segera mengambil langkah tegas pada Prof Budi

Santosa Purwokartiko.

"Mas Menteri harus bertindak tegas. Jangan biarkan orang-orang yang dengan enteng dan gampang menyuarakan ujaran kebencian dan pelecehan verbal terkait SARA berada di dalam lingkungan pendidikan," tegas Ledia.

Wakil Ketua Komisi X FPKS Desak Pemerintah **Evaluasi** Rektor ITK

KUTIPAN

Jakarta (15/05) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengevaluasi Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof Budi Santosa Purwokartiko gegara ujaran menyinggung orang memakai penutup kepala sebagai manusia gurun.

Ada tiga catatan yang perlu dievaluasi Kemdikbudristek terhadap Prof Budi. Pertama Prof Budi sebagai reviewer LPDP sebelum akhirnya dicopot Kemdikbudristek. Menurut Abdul Fikri, Prof Budi tak objektif dalam opini soal 'manusia gurun'.

"Sebagai reviewer ini jelas karena dia beropini di luar parameter penilaian untuk menyeleksi kualifikasi seseorang layak atau tidaknya menerima beasiswa dari LPDP. Ini bukti penilaian dia tidak objektif, bahkan memunculkan kegaduhan," kata Abdul Fikri

kepada wartawan, Sabtu (14/5/2022).

Catatan kedua yang harus dievaluasi Kemdikbudristek terhadap Prof Budi yang posisinya sebagai Rektor ITK. Dia menilai Prof Budi sebagai rektor telah lalai dalam berujung di media sosial.

"Sebagai Rektor sesuai PP 30/1990 sebagaimana telah diubah menjadi 57/1998 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 38: Rektor bisa diberhentikan oleh Presiden bila diusulkan oleh Menteri. Dan nampaknya dia tidak sadar sebagai rektor atau lalai mengunggah pernyataan di ruang publik

dalam hal ini lewat dunia maya yang berpotensi bermasalah secara hukum," ucapnya.

Ketiga adalah posisi Prof Budi sebagai Guru Besar juga harus dievaluasi. Sebab, kata Abdul Fikri, Prof Budi membuat pernyataan yang tidak saintifik dan tak bersandar kepada kaidah ilmiah.

"Misal berdasar pada hasil penelitian atau berdasarkan data dari seri waktu dengan sample yang memadai. Sama sekali tidak muncul baik metodologi, landasan teoritik, sampel hingga konklusi dan rekomendasi yang kuat, sehingga bermanfaat bagi perbaikan pendidikan," ujarnya.

Seperti diketahui, Rektor ITK Prof Budi Santosa Purwokartiko saat ini masih tetap aktif di kampus ITK di tengah desakan mundur karena unggahan tentang manusia gurun. Budi saat ini masih mendampingi program studi di ITK.

"Prof Budi Santosa dalam hal ini tetap aktif menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dan saat ini sedang mendampingi program studi yang ada di ITK dalam penyusunan akreditasi



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Sebagai reviewer ini jelas karena dia beropini di luar parameter penilaian untuk menyeleksi kualifikasi seseorang layak atau tidaknya menerima beasiswa dari LPDP. Ini bukti penilaian dia tidak objektif, bahkan memunculkan kegaduhan"

internasional. Secara umum ITK tetap berproses seperti biasanya, bahkan tetap berjalan lancar, dan memohon kepada masyarakat untuk tetap tenang karena proses sedang

berjalan," ujar Wakil Rektor Bidang Non Akademik Dr Muhammad Mashuri dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/5).

Halal Bihalal di BPB, Fikri Faqih: Kita **Saling Mengingat** Untuk **Bersyukur**

KUTIPAN

Jakarta — Implementasi Halal bi Halal, pelajarannya adalah kesuksesan orang jadi pemimpin bila tingkat literasinya tinggi. Dalam Islam, perintah pertama adalah membaca.

Halal Bihalal juga menjadi ajang saling mengingatkan untuk bersyukur, dan saling memberikan makna serta mengimplemen-
tasikannya. Sehingga kita menjadi orang bertaqwa dan orang yang bersyukur.

Hal itu dikatakan Dr. H. Abdul Fikri Faqih saat memberikan ceramahnya pada Halal Bihalal di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPB) Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, di Masjid Adz Dzikra Rawamangun, Jakarta, Rabu 11 Mei 2022 kemarin.

“Perintah membaca diberikan kepada Nabi Muhammad yang saat itu tidak punya kemampuan membaca. Dari membaca tersebut, maka terjadi peningkatan parameter

kemanusiaan moralitas, teknologi dan lain-lain,” ujar Fikri yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Dikatakan Politisi PKS dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota-Kab. Tegal dan Brebes) ini, bahwa membaca adalah bagian dari keimanan, dan sesuai dengan hak-haknya misalnya membaca harus dilakukan terus menerus.

Lebih lanjut menurut Fikri yang didapuk di beberapa tempat sebagai penceramah acara Halal Bihalal, bahwa membaca itu untuk mendapatkan ilmu atau aspek kognisi, karena untuk penguasaan dunia atau akhirat adalah dengan ilmu.

“Ini akan bernilai ibadah dan akan mendapat balasan dari Allah sebagai bentuk

apresiasi yang tertinggi,” tutur Fikri.

Selain itu, dalam ceramahnya Fikri menegaskan bahwa manusia untuk saling mengingatkan untuk bersyukur atas segala sesuatu, sebagaimana tujuan puasa adalah untuk menjadikan orang bertaqwa dan orang yang bersyukur.

Karenanya, setelah Ramadhan semua mengucapkan takbir, mengagungkan Allah. Artinya orang yang berhasil puasanya, akan membekas bahwa semua urusan kecil dan yang besar hanya karena Allah.

“Halal Bihalal meski tidak ada dalil sebagai dasar langsung, ternyata sudah mulai ada saat Mangkunegara I atau Radenmas Syahid, Pangeran Samber Nyawa Kraton Solo sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Islam dengan mengambil dasar dari Ayat 133 - 136 surat Ali Imron,” urai Fikri.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Membaca itu untuk mendapatkan ilmu atau aspek kognisi, karena untuk penguasaan dunia atau akhirat adalah dengan ilmu. Ini akan bernilai ibadah dan akan mendapat balasan dari Allah sebagai bentuk apresiasi yang tertinggi”





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



From this
to this

PKS Tuntut Rektor Rasis Dipecat!



"Sikap tegas pemerintah dan aparat penegak hukum (Kemendikbud Dikti dan Kepolisian) mesti segera ditunjukkan kepada publik"
- **Fahmy Alaydroes**



"Mas Menteri harus bertindak tegas. Jangan biarkan orang-orang yang dengan enteng dan gambang menyuarakan ujaran kebencian dan pelecehan verbal terkait SARA berada di dalam lingkaran pendidikan" - **Ledia Hanifa Amaliah**



"Harus ada evaluasi dan perbaikan sistem manajemen secara serius, jangan hanya berhenti pada pemecatan yang bersangkutan. Jika tidak berbenah diri, hal serupa dapat terjadi lagi di kemudian hari," - **Netty Prasetyani**



"Saya mendesak Kemendikbud segera bertindak dengan tegas. Apa yang dilakukan oleh Budi Santosa Purwokartiko sudah selayaknya ditindak tegas" - **Sakinah Aljufri**



"Sebaiknya Mendikbudristek mengambil langkah strategis karena ini sudah masuk ke ranah hukum" - **Fikri Faqih**



"LPDP diharapkan tidak hanya membuat pernyataan resmi dan menindak tegas, tapi menjamin ada langkah yang berkelanjutan sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali" - **Junaidi Auly**



"Tidak selayaknya dan tidak ada tempat bagi orang yang punya pemikiran rasisme ikut terlibat dalam seleksi dan penetapan pemberian beasiswa yang didanai LPDP" Saya minta Kemendikbud dan pihak LPDP harus melakukan evaluasi atasnya." - **Ecky Awal Mucharam**

Aleg PKS: Tindak Tegas Dugaan Pelecehan Verbal oleh Rektor!

KUTIPAN

Jakarta (01/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly prihatin terhadap dugaan adanya pelecehan verbal Budi Santosa Purwokartiko terhadap peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Anggota Komisi XI menjelaskan LPDP seharusnya lebih selektif dalam memilih pewawancara calon penerima beasiswa. Kegagalan dalam memilih pewawancara akan berdampak hasil seleksi calon penerima beasiswa.

Menurut Junaidi, LPDP sesegera mungkin melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai proses seleksi termasuk didalamnya spesifikasi dan kelayakan pewawancara. Pewawancara penting memiliki kelayakan termasuk di dalamnya toleransi dan etika dalam menggunakan media sosial.

“Silahkan menggunakan media sosial, namun media ini harus digunakan secara bijak.

Kesalahan dalam merangkai kata dapat menimbulkan kegaduhan dan konsekuensi hukum” pungkas Junaidi.

Anggota FPKS ini menambahkan calon penerima beasiswa agar tidak segan-segan melaporkan terkait tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi. LPDP agar melakukan langkah nyata dalam memperluas saluran pelaporan sehingga akan memperjelas berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi.

“LPDP diharapkan tidak hanya membuat pernyataan resmi dan menindak tegas, tapi menjamin ada langkah yang berkelanjutan sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali” tutup Junaidi.



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

“LPDP sesegera mungkin melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai proses seleksi termasuk didalamnya spesifikasi dan kelayakan pewawancara. Pewawancara penting memiliki kelayakan termasuk di dalamnya toleransi dan etika dalam menggunakan media sosial”



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif

#MIMBAR
DEMOKRASI
KEBANGSAAN
FRAKSI PKS DPR RI

SERI 8

Momentum Hari
Kebangkitan
Nasional

Kebangkitan Ekonomi Daerah:

Masa Depan Indonesia



Keynote Speaker

**H. Ahmad
Syaikh**

Presiden PKS



Sambutan

**Dr. Jazuli
Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS
DPR RI



Narasumber

**Prof. Dr.
Djohermansyah
Johan, MA**

Pakar Otonomi Daerah/
Presiden i-Otda



Narasumber

**Dr. Zulkiefli-
nas**

Gubernur
Provinsi NTB

Dr. Salim

Ketua Majelis Syuro PKS

Saksikan :
Senin 23 Mei 2022
Pk. 13.30 WIB

LIVE

Youtube:
PKSTV
PKSTV DPR RI



Hari Buruh Internasional

**Momentum
perbaikan
Nasib Pekerja
dalam
Undang-
Undang
Cipta Kerja**

OLEH

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR-RI Fraksi PKS

Peringatan Hari Buruh tahun 2022 ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang penuh dengan pemberitaan tuntutan pekerja. Hari Buruh tahun ini yang jatuh hanya satu hari menjelang Idul Fitri membuat peringatan hari Buruh ini seperti tidak ada gaungnya.

Apalagi juga dengan situasi demikian, tidak ada aksi unjuk rasa pekerja dalam memperingati hari buruh ini. Beberapa serikat pekerja memang menyampaikanuntutannya untuk perbaikan nasib pekerja, namun tetap saja sepi dari pemberitaan.

Menjelang Hari Buruh ini, sesungguhnya ada dua peristiwa yang bisa menjadi momentum bagi perbaikan nasib pekerja setelah sebelumnya sempat terpukul akibat dua kebijakan pemerintah.

Pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan yang dilayangkan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 ini inkonstitusional bersyarat.

Kedua adalah akan direvisinya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 2 Tahun 2020 tentang pencairan Jaminan Hari

Tua (JHT) sekaligus menyatakan Permenaker ini belum efektif berlaku. Dengan demikian pencairan JHT ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu pekerja berusia 56 tahun atau kembali ke aturan lama tentang JHT.

Sebelum kedua keputusan ini, nasib pekerja betul-betul terpukul akibat aturan dalam UU Cipta Kerja yang dinilai justru merugikan pekerja terutama dalam hal aturan tentang orerjanjian kerja waktu tertentu, pekerja alih daya (Outsourcing) dan ketentuan pengupahan. Demikian pula dengan dikeluarkannya Permenaker No. 2 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa JHT baru bisa diambil setelah pekerja berusia 56 tahun.

Padahal ketika banyak pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama akibat pandemi covid-19 yang berkepanjangan, para pekerja banyak yang membutuhkan JHT tersebut sebagai modal untuk membuka usaha.



Momentum perbaikan Nasib Pekerja ... (2)

Putusan MK sebagai Peringatan Bagi Pemerintah

Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja dengan nomor Nomor 103/PUU-XVIII/2020 setidaknya memuat empat hal penting yang memberi harapan bagi pekerja. Dalam putusan MK, dua hakim MK yaitu Ketua MK Anwar Usman dan mantan Ketua MK Arief Hidayat menilai beberapa pasal terkait dengan PHK, tenaga alih daya dan sistem pengupahan harus dibatalkan. Keempat hal yang diminta dibatalkan ketentuannya dalam UU Cipta Kerja tersebut adalah (1) jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau sering disebut kontrak kerja, (2) relasi antara Perusahaan Alih Daya

(outsourcing) -Perusahaan Pemberi Kerja dengan Pekerja, (3) sistem pengupahan, dan (4) pembayaran pesangon dalam pemutusan hubungan kerja. Hakim MK menilai pasal-pasal terkait keempat hal tersebut harus dibatalkan karena berkaitan erat dengan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfil) hak konstitusional pekerja.

Ketentuan waktu PKWT dinilai merugikan pekerja karena statusnya yang bisa selamanya menjadi pekerja kontrak (PKWT) karena tidak adanya batasan waktu untuk status PKWT nya serta adanya peluang perpanjangan kontrak terus-menerus. Seharusnya pekerja PKWT hanya dibatasi

jangka waktu kontrak 2,5 tahun dan perpanjangan maksimal satu tahun.

Jika setelah masa perpanjangan pekerjaan tersebut belum selesai, maka pemberi kerja harus mengubah status pekerja kontrak ini menjadi pekerja tetap. Aturan pekerja kontrak ini juga yang menjadi salah satu sorotan Fraksi PKS DPR-RI dalam membahas UU Cipta Kerja karena dinilai sangat merugikan pekerja terutama yang tidak mudah melakukan perpindahan perusahaan tempat bekerja.

Fraksi PKS sejak awal menilai bahwa ketentuan tentang PKWT ini tidak memberikan jaminan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Jangka waktu untuk PKWT ini secara normatif juga seharusnya diatur dalam undang-undang dan tidak boleh dalam peraturan pemerintah karena terkait erat dengan pengaturan hak konstitusional pekerja yang perlu dibahas dan diputuskan bersama oleh DPR dan Pemerintah melalui instrumen hukum undang-undang.

Selama ini, dengan aturan hukum yang lama pun banyak pekerja kontrak yang dirugikan karena pemberi pekerja yang banyak melanggar aturan kerja kontrak ini. Maka dengan diberi



Fraksi PKS sejak awal menilai bahwa ketentuan tentang PKWT ini **tidak memberikan jaminan perlakuan yang adil dan layak** dalam hubungan kerja dan tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. (Image : BBC)

peluang melakukan proses kontrak pekerja tanpa batas waktu akan membuat pekerja semakin dirugikan.

Terkait dengan ketentuan tentang pekerja alih daya (outsourcing), sejak awal Fraksi PKS menilai bahwa ketentuan dalam UU Cipta Kerja ini kurang memberikan perlindungan dan

penghargaan yang memadai bagi pekerja outsourcing.

Hal ini karena adanya peluang pekerja outsourcing dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat pokok atau core business perusahaan (bukan lagi penunjang) namun dengan status tetap sebagai pekerja PKWT. Padahal dengan berge-

KUTIPAN

Ketentuan waktu PKWT dinilai merugikan pekerja karena statusnya yang bisa selamanya menjadi pekerja kontrak (PKWT) karena tidak adanya batasan waktu untuk status PKWT nya serta adanya peluang perpanjangan kontrak terus-menerus. Seharusnya pekerja PKWT hanya dibatasi jangka waktu kontrak 2,5 tahun dan perpanjangan maksimal satu tahun.

Momentum perbaikan Nasib Pekerja ... (3)



Dalam hal pengupahan, **UU Cipta Kerja cenderung merugikan pekerja** karena ditiadakkannya klasifikasi upah minimum berdasarkan wilayah propinsi dan kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor di satu wilayah, tidak adanya Dewan Pengupahan Propinsi dalam memberikan rekomendasi penentuan upah minimum dan dihapusnya keterlibatan serikat pekerja. (Image: antara)

sernya pekerjaan, sudah menunjukkan adanya peningkatan skill dan keahlian dari pekerja outsourcing tersebut.

Dalam hal pengupahan juga, UU Cipta Kerja cenderung

merugikan pekerja karena ditiadakkannya klasifikasi upah minimum berdasarkan wilayah propinsi dan kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor di satu wilayah, tidak

adanya Dewan Pengupahan Propinsi dalam memberikan rekomendasi penentuan upah minimum dan dihapusnya keterlibatan serikat pekerja.

Buah dari ketentuan pengupahan yang selanjutnya diatur melalui PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ini muncul dalam penetapan Upah Minimum 2022 yang besaran kenaikannya dibatasi hanya 1,09% dengan alasan perekonomian yang belum pulih. Hal yang sama juga pada ketentuan tentang PHK yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 sebagai pelaksana dari UU Cipta Kerja yang mengatur jumlah pembayaran uang pesangon dengan nominal lebih rendah dari ketentuan yang sebelumnya.

Adanya keputusan MK yang secara jelas menunjukkan adanya permasalahan substansif dalam UU Cipta Kerja ini dan bertentangan dengan konstitusi semakin memperjelas ada yang salah dalam pembuatan UU Cipta Kerja ini. Putusan MK ini sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah dalam pembuatan suatu produk Undang-Undang dengan pendekatan Omnibus dan menyangkut kehidupan dan hak hidup layak bagi pekerja. Apalagi proses pembuatan sampai penetapan UU Cipta Kerja ini terkesan terburu-buru, dipaksakan dan tidak transparan.

Seperti yang disampaikan mantan Ketua MK, tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode omnibus law campur sari seperti UU CK, karena metode demikian melahirkannya UU yg tidak fokus, tujuan dan filosofisnya tidak jelas yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan MK ini sekaligus memberi peringatan kepada pemerintah dan DPR untuk tidak boleh lagi membahas suatu RUU yang menyangkut kepentingan strategis bangsa dengan sambil lalu, tanpa melibatkan masya-

rakat secara luas dan serius.

Kembalikan Hak Pekerja, Perbaiki Aturan Ketenagakerjaan

Alih-alih berusaha mencari pembedaan dan melakukan counter terhadap putusan MK ini, sebaiknya pemerintah menjalankan putusan MK ini dengan memperbaiki UU No. 11 Tahun 2021 ini sekaligus memenuhi hak-hak pekerja. Jika pada proses pembuatan UU Cipta Kerja ini sangat minim partisipasi dan masukan dari Serikat Pekerja, maka putusan

KUTIPAN

Adanya keputusan MK yang secara jelas menunjukkan adanya permasalahan substansif dalam UU Cipta Kerja ini dan bertentangan dengan konstitusi semakin memperjelas ada yang salah dalam pembuatan UU Cipta Kerja ini. Putusan MK ini sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah dalam pembuatan suatu produk Undang-Undang dengan pendekatan Omnibus dan menyangkut kehidupan dan hak hidup layak bagi pekerja. Apalagi proses pembuatan sampai penetapan UU Cipta Kerja ini terkesan terburu-buru, dipaksakan dan tidak transparan.

Momentum perbaikan Nasib Pekerja ... (Tamat)

MK ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih mengakomodasi masukan dari pekerja.

Ketika setiap tahun dalam momen hari buruh pekerja selalu menuntut perbaikan kesejahteraan pekerja, maka dalam momen Hari Buruh tahun ini, sudah seharusnya pemerintah menjalankan putusan MK terhadap UU Cipta Kerja terkait empat point krusial yang berpengaruh terhadap

nasib dan kesejahteraan pekerja.

Salah satu bentuk menjalankan putusan MK ini adalah dengan tidak membuat peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja yang baru maupun mengambil kebijakan strategis dalam melaksanakan peraturan yang ada karena ada putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat.

Penetapan upah minimum

yang menggunakan PP No. 36 Tahun 2021 yang kemudian dinilai terlalu rendah kenaikannya dan tidak diikuti oleh beberapa daerah seperti DKI Jakarta. Jika pun pemerintah melakukan perbaikan atas UU No. 11 Tahun 2020 ini, maka semangatnya adalah pemenuhan atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusional pekerja, karena ketiga hal itulah yang menjadi landangan putusan MK.

Perbaikan dilakukan bukan karena semangat mendatangkan investasi dengan mengorbankan pekerja atau dengan kata lain mencari pembenaran atas permasalahan substansif dari UU Cipta Kerja ini. Fraksi PKS akan terus mengawal proses perbaikan ini agar sesuai dengan substansi dan apa yang menjadi latar belakang putusan MK ini.

Pemerintah juga harus konsisten melaksanakan Permenaker No. 4 Tahun 2022 yang merupakan revisi dari Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Harus diapresiasi pada akhirnya pemerintah menyadari kekeliruannya ketika membuat peraturan bahwa JHT hanya bisa diambil setelah pekerja berusia 56 tahun. Padahal dalam situasi ketika banyak

KUTIPAN

Penetapan upah minimum yang menggunakan PP No. 36 Tahun 2021 yang kemudian dinilai terlalu rendah kenaikannya dan tidak diikuti oleh beberapa daerah seperti DKI Jakarta. Jika pun pemerintah melakukan perbaikan atas UU No. 11 Tahun 2020 ini, maka semangatnya adalah pemenuhan atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusional pekerja, karena ketiga hal itulah yang menjadi landangan putusan MK.

PHK berlangsung akibat pandemi covid-19 dan ekonomi terkontraksi serta lapangan kerja sulit, pekerja membutuhkan JHT tersebut untuk menyambung hidup dan diantaranya mungkin akan memilih berwiraswaha menggunakan modal dari JHT yang didapat.

Keputusan untuk merevisi Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini juga dilakukan setelah mendapat desakan dari berbagai pihak terutama kalangan pekerja.

UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat serta Permenaker No 2 Tahun 2022 yang akhirnya direvisi

membuktikan pendulum kebijakan ketenagakerjaan oleh pemerintah tidak berpihak ke pekerja. Maka kitapun mendesak pemerintah melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja ini terutama pada pasal-pasal yang terkait dengan nasib pekerja sebagaimana desakan dari berbagai pihak, bahkan sejak UU Cipta Kerja masih dalam pembahasan di DPR. Jika ini dilakukan, maka ini akan menjadi salah satu hadiah bagi pekerja di tahun ini.

Selamat Hari Buruh Internasional ●



Harus diapresiasi pada akhirnya pemerintah menyadari kekeliruannya ketika membuat peraturan bahwa JHT hanya bisa diambil setelah pekerja berusia 56 tahun. (Image : Istimewa)

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokrakj Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.

BURT DPR Minta BPK **Audit** Anggaran Gorden Rumah Dinas Rp 43,5 Miliar

KUTIPAN

Jakarta - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait besaran harga dan pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR yang mencapai Rp 43,5 miliar. BURT kemudian bakal memutuskan lanjut atau tidaknya proyek tersebut.

"Saya akan minta inspektorat utama dan BPK untuk audit segera terkait harga dan pengadaannya," kata Wakil BURT Achmad Dimiyati Natakusumah kepada wartawan, Senin (9/5/2022).

"Baru BURT akan memutuskan lanjut atau tidak dan dicek ada berapa yang ikut lelang dan kenapa yang di bawahnya tidak memenuhi syarat," lanjutnya.

Dimiyati mengakui proses penganggaran pengadaan gorden yang sempat digodok di

BURT. Namun, dia mengatakan mekanisme pengadaan dibebaskan tidak ada intervensi dari pihaknya.

"Semua digodok di BURT untuk anggaran DPR. Tidak bisa ujug-ujug," kata politikus PKS itu.

"Tapi terkait mekanisme pengadaan itu bebas dan mandiri pimpinan dan anggota DPR apalagi BURT tidak bisa intervensi dan ikut campur," lanjut Dimiyati.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**DR. H. R. A. DIMIYATI
NATAKUSUMAH, SH, MH**

Wakil Ketua BURT DPR RI

"Saya akan minta inspektorat utama dan BPK untuk audit segera terkait harga dan pengadaannya, Baru BURT akan memutuskan lanjut atau tidak dan dicek ada berapa yang ikut lelang dan kenapa yang di bawahnya tidak memenuhi syarat



Tanggapi Kebakaran Kilang Minyak, Aleg PKS: Pemerintah **Harus Lakukan Investigasi!**

KUTIPAN

Diah pun meminta penyelidikan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut. "Perlu dilakukan investigasi secara menyeluruh, mengapa kebakaran ini terus saja berulang", tegasnya.

Jakarta (17/05) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, menyesalkan kembali terbakarnya kilang minyak Pertamina.

Hal ini disampaikan dalam Program Unggulan Fraksi PKS, PKS Legislatif Report, saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, Selasa, (17/05).

"Kami prihatin terhadap beberapa kejadian kebakaran kilang minyak Pertamina. Terakhir, terjadi di Balikpapan dan menewaskan satu orang. Di tengah kondisi kita ingin meningkatkan produksi minyak, khususnya BBM di Indonesia, justru sering terjadi kebakaran

di kilang", ujar Diah.

Diah pun meminta penyelidikan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut. "Perlu dilakukan investigasi secara menyeluruh, mengapa kebakaran ini terus saja berulang", tegasnya.

Mengingat, imbuh Diah, kebakaran kilang telah menyebabkan kerugian yang besar bagi Pertamina dan masyarakat luas.

"Kebakaran ini sangat merugikan, bukan hanya secara materi semata. Mengingat, pasca kebakaran, jelas kegiatan produksi akan terhenti dan menciptakan gangguan terhadap pasokan BBM", tuturnya.

Dikesempatan yang sama,

Diah juga menerangkan soal rencana kenaikan BBM.

"Di Komisi VII, pada masa sidang ini, kemungkinan kita akan tetap membahas tentang harga BBM dalam negeri. Karena sekarang memasuki pembahasan pendahuluan terkait APBN 2023, sehingga perlu kita dicermati, bagaimana perkembangan harga migas internasional dan dampaknya terhadap Indonesia", pungkasnya.



Dipl.Ing. Hj. **DIAH NURWITASARI**, M. I. POL.
Anggota Komisi VII DPR RI



Kami prihatin terhadap beberapa kejadian kebakaran kilang minyak Pertamina. Terakhir, terjadi di Balikpapan dan menewaskan satu orang. Di tengah kondisi kita ingin meningkatkan produksi minyak, khususnya BBM di Indonesia, justru sering terjadi kebakaran di kilang

Pembicaraan Pendahuluan APBN 2023 Segera Dimulai, Legislator PKS: **Kami Akan Kawal!**

KUTIPAN

Jakarta (17/05) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk mengawal pembahasan pembicaraan pendahuluan APBN 2023.

Hal ini disampaikan dalam Program Unggulan Fraksi PKS, PKS Legislative Report, saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, Selasa, (17/05).

"Masa sidang ini akan sangat padat dengan pembahasan pembicaraan pendahuluan tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Ini menjadi bagian sangat penting. Kita harus memastikan bahwa semua program-program yang berpihak pada masyarakat, semua program yang menjadi kunci besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat, harus betul-betul kita dorong di APBN 2023", ujarnya.

Menurut Ledia, pembahasan di DPR akan sangat krusial karena hasilnya akan disampaikan Presiden sehari menjelang hari kemerdekaan mendatang.

"Nanti ketika tanggal 16 Agustus 2022, saat Presiden menyampaikan tentang nota keuangan APBN 2023, harapannya, semua item-item yang disebutkan beliau sudah pernah dibahas dan dibicarakan di DPR", tegasnya.

Oleh sebab itu, imbuh Ledia, Fraksi PKS memastikan akan fokus dalam melakukan

pembahasan APBN tersebut.

"Kami akan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam pembahasan pendahuluan APBN, mohon doanya", pungkas Ledia.



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI



Masa sidang ini akan sangat padat dengan pembahasan pembicaraan pendahuluan tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Ini menjadi bagian sangat penting. Kita harus memastikan bahwa semua program-program yang berpihak pada masyarakat, semua program yang menjadi kunci besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus betul-betul kita dorong di APBN 2023",

Turun ke Dapil, Wakil Ketua FPKS **Jelaskan** Pentingnya RUU Narkotika

KUTIPAN

Jakarta (17/05) --- Dalam kunjungannya ke masyarakat saat reses, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mensosialisasikan RUU Narkotika perlu untuk segera disahkan.

Hal itu disampaikan dalam Program Unggulan Fraksi PKS, PKS Legislative Report, saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, Selasa, (17/05).

"Dalam masa reses, saya menjelaskan pentingnya RUU Narkotika yang belum banyak diketahui oleh masyarakat", jelas Adang.

Menurut Adang, dengan UU yang eksisting sekarang, ternyata lapas semakin penuh, pembiayaan negara semakin besar, dan yang sangat berat adalah 60% orang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah korban narkoba.

"Oleh sebab itu, dengan adanya UU baru yang sedang dibahas, perlu diperjelas status siapa bandar, siapa korban.

Karena kita ingin bahwa tidak setiap korban narkoba dibawa ke penegak hukum", tegasnya.

Konsep rehabilitasi, imbuh Adang, perlu dikembangkan dalam menangani kasus narkoba.

"Harapannya, dengan adanya mainstreaming konsep rehabilitasi ini, bisa meringankan keuangan negara dan jumlah tahanan yang ada di LP menurun", pungkask Adang.



Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Dengan UU yang eksisting sekarang, ternyata lapas semakin penuh, pembiayaan negara semakin besar, dan yang sangat berat adalah 60% orang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah korban narkoba. Oleh sebab itu, dengan adanya UU baru yang sedang dibahas, perlu diperjelas status siapa bandar, siapa korban. Karena kita ingin bahwa tidak setiap korban narkoba dibawa ke penegak hukum

Aleg PKS Desak Pemerintah Jelaskan Transisi Pandemi dan Hepatitis Akut ke Masyarakat

KUTIPAN

Jakarta (17/05) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, meminta Pemerintah menjelaskan kepada masyarakat terkait transisi pandemi ke endemi Covid-19 dan hepatitis akut.

Hal itu disampaikan dalam Program Unggulan Fraksi PKS, PKS Legislative Report, saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, Selasa, (17/05).

"Selama masa reses, banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai kejelasan transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi. Oleh karenanya, kami meminta Pemerintah mampu menyiapkan saran dan prasarana, sistem dan fasilitas kesehatan, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan

kesehatan", tegas Netty.

Lebih lanjut, Anggota DPR asal Dapil Jawa Barat ini pun meminta Pemerintah memberi penjelasan yang komprehensif soal hepatitis akut yang meresahkan publik.

"Pemerintah juga diharapkan mampu menjelaskan dengan baik tentang hepatitis akut yang menjangkiti beberapa anak Indonesia di sejumlah tempat. Semoga dengan penjelasan yang akurat dan valid, tidak ada kepanikan dan kegaduhan, justru meningkatkan kewaspadaan masyarakat", pungkasnya.



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

"Selama masa reses, banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai kejelasan transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi. Oleh karenanya, kami meminta Pemerintah mampu menyiapkan saran dan prasarana, sistem dan fasilitas kesehatan, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan"

Aleg PKS: Pemerintah **Harus** **Atasi** Harga Komoditas Pangan

KUTIPAN

Jakarta (17/05) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, meminta Pemerintah segera stabilkan harga komoditas yang terlalu rendah di tingkat petani.

Hal itu disampaikan dalam Program Unggulan Fraksi PKS, PKS Legislative Report, saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, Selasa, (17/05).

"Aspirasi dari Dapil saya, masih tetap soal harga komoditas yang terlalu rendah. Harga gabah di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP). Harga jagung juga jauh menurun, anjlok. Hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan petani kita", ungkap Johan.

Politisi asal NTB ini menyatakan bahwa isu harga komoditas ini akan menjadi perhatian baginya di masa sidang kali ini.

"Ini tentu akan menjadi pekerjaan rumah kita ke depan,

dalam pembicaraan-pembicaraan, pengambilan kebijakan bersama Menteri-Menteri terkait", tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Johan pun mengkritik sikap represif negara dalam menyelesaikan persoalan konflik antara perusahaan dan petani sawit.

"Kami mendapat informasi, 40 orang petani sawit ditangkap akibat konflik lahan. Hal ini tentu akan kami advokasi, PKS akan tindaklanjuti. Mudah-mudahan ke depan negara hadir dengan lebih manusiawi, karena kehadiran negara bukanlah untuk menangkang masyarakat, tetapi melindungi segenap rakyat", pungkas Johan.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Kami mendapat informasi, 40 orang petani sawit ditangkap akibat konflik lahan. Hal ini tentu akan kami advokasi, PKS akan tindaklanjuti. Mudah-mudahan ke depan negara hadir dengan lebih manusiawi, karena kehadiran negara bukanlah untuk menangkang masyarakat, tetapi melindungi segenap rakyat

Harga Sawit Anjlok, Anggota FPKS: Segera Stabilkan Harga di Tingkat Petani!

KUTIPAN

Jakarta (17/05) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, meminta Pemerintah segera menstabilkan harga sawit di tingkat petani.

Hal itu disampaikan dalam Program Unggulan Fraksi PKS, PKS Legislative Report, saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, Selasa, (17/05).

"Harga sawit saat ini benar-benar anjlok, sampai titik nadirnya. Banyak sawit petani yang tidak terserap oleh industri. Kita mendorong Pemerintah agar harga sawit yg anjlok ini bisa segera teratasi, sehingga petani bersemangat", ujar Hermanto.

Menurut Hermanto, rendahnya harga sawit yang terjadi sekarang ini membuat petani putus asa.

"Mereka hope less. Seakan

tidak ada harapan lagi untuk terus mengembangkan perkebunan sawit ini", ungkapnya lebih lanjut.

Hermanto melanjutkan, jika Pemerintah gagal mengatasi persoalan sawit ini tentu akan berakibat buruk kepada masyarakat.

"Pemerintah harus menciptakan equilibrium atau keseimbangan, bagaimana caranya agar ekspor tetap ada, di sisi lain, kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi. Jika tidak, setiap kebijakan yang diambil selalu akan merugikan bagi semua pihak", pungkask Hermanto.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

"Harga sawit saat ini benar-benar anjlok, sampai titik nadirnya. Banyak sawit petani yang tidak terserap oleh industri. Kita mendorong Pemerintah agar harga sawit yg anjlok ini bisa segera teratasi, sehingga petani bersemangat"

Junaidi Auly: Minimnya Infrastruktur Jadi Keluhan Masyarakat saat Serap Aspirasi di Dapil

KUTIPAN

Jakarta (17/05) — Selama masa reses, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly, mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait infrastruktur yang belum memadai di wilayah mereka.

Hal itu disampaikan dalam Program Unggulan Fraksi PKS, PKS Legislative Report, saat ia menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, Selasa, (17/05).

"Di Dapil saya, Lampung II, ada tujuh kabupaten. Banyak sekali yang harus dibenahi tentang masalah infrastruktur di kawasan tersebut. Karena sampai hari ini, di Lampung, masih banyak jalan di kawasan pedalaman belum memadai.

Ini hal keluhan yang sering saya dapati dari masyarakat", ungkap Junaidi.

Oleh sebab itu, Junaidi mendorong agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan anggota DPR di Komisi V yang mengurus soal infrastruktur, bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.

"Saya ada di Komisi XI, sebenarnya tidak membidangi infrastruktur. Karenanya, saya akan meminta rekan-rekan di instansi dan komisi terkait guna membenahi hal ini",



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I

"Harga sawit saat ini benar-benar anjlok, sampai titik nadirnya. Banyak sawit petani yang tidak terserap oleh industri. Kita mendorong Pemerintah agar harga sawit yg anjlok ini bisa segera teratasi, sehingga petani bersemangat"



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri

Silaturahmi dengan PD Muhammadiyah di Depok, Nur Azizah Ajak Ormas Tetap Melek Politik

KUTIPAN

Depok - Dalam rangkaian Agenda Reses Anggota DPR RI Masa Persidangan ke IV, Tahun Sidang 2021-2022, Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A bersilaturahmi dengan jajaran Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Depok.

Dalam Agenda Silaturahmi pada Senin (25/4) Di Kantor Pengurus Muhammadiyah Kota Depok. Nur Azizah menekankan pentingnya Ormas untuk tetap paham dan melek politik.

Pada Kesempatan ini, Nur Azizah turut mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk diantaranya Ormas Islam agar senantiasa memahami politik. Apapun agama, suku, tingkat ekonomi dan pendidikan nya.

“Kita harus paham tujuan mulia politik, sebagaimana ungkapan Aristoteles, yaitu tekad atau kemauan untuk mencapai kebaikan bersama. Jangan sampai ada persepsi Politik itu jahat, kotor, dan jelek.

Hingga ada upaya pemisahan politik dengan agama. tentu hal itu bertentangan dengan tujuan politik yang sebenarnya.”, tegas Nur Azizah.

Nur Azizah menambahkan, dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat empat cita-cita Nasional bangsa Indonesia, yang mana harus berdasarkan pada Pancasila.

“Di sila pertama, dalam penyelenggaraan negara kita harus ber Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita tidak boleh Atheis. Ajaran agama harus membentuk etika dan karakter para pemimpin dalam mengelola bangsa dan negara,

sehingga kita menyadari sebagai negara hukum harus adil, tidak saling mendzalimi, cerdas, terampil, dan berkapasitas untuk bergaul antar bangsa-bangsa di dunia”, jelasnya.

Sejalan dengan itu, K.H. Idrus Yahya, selaku Ketua PD Muhammadiyah Kota Depok, setuju dengan Nur Azizah. Menurutnya, hal itu penting, mengingat berbagai kebijakan yang dibuat oleh para pemangku kebijakan saat ini dilalui melalui proses politik. Sebagai Ormas Islam, Muhammadiyah tidak anti politik, dan senantiasa mendukung para pelaku politik khususnya yang membela kepentingan umat Islam.

Pada kesempatan ini turut hadir H. Dahlan, yang merupakan salah satu pengurus PD Muhammadiyah Kota Depok. Ia mengucapkan rasa terimakasih kepada PKS, meskipun hanya dengan 50 kursi DPR RI namun berani menjadi oposisi.

“Dengan PKS menjadi oposisi minimal ada yang mengingatkan, agar pemerintah ini tidak kebablasan”, terang H.



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Kita harus paham tujuan mulia politik, sebagaimana ungkapan Aristoteles, yaitu tekad atau kemauan untuk mencapai kebaikan bersama. Jangan sampai ada persepsi Politik itu jahat, kotor, dan jelek. Hingga ada upaya pemisahan politik dengan agama. tentu hal itu bertentangan dengan tujuan politik yang sebenarnya.”,

Dahlan.

Ia menambahkan, propaganda media sosial saat ini juga begitu luar biasa. Kita dibuat hilang kepercayaan dengan berbagai pemberitaan hoax, serta banyaknya ujaran kebencian.

“Mudah-mudahan dengan kehadiran ibu Nur Azizah disini bisa menitipkan aspirasi kami. Kita berjuang bersama-sama melawan kezaliman kepada umat Islam di negeri ini”, pungkasnya.

Syaikhu Reses Virtual Bersama Tokoh Masyarakat di Dapil

KUTIPAN

Kabupaten Bekasi (11/05) — Era Digital dimanfaatkan Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu secara optimal. Saat reses pada 20-28 April 2022, Syaikhu bertemu tokoh masyarakat secara virtual.

Mereka berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 7 yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Ini kali pertama Syaikhu mengadakan reses secara daring. Menurutnya, hal ini dilakukan karena wilayah dapilnya yang luas.

"Cara ini saya lakukan karena dapil saya yang membentang luas. Tak mungkin saya bertemu dengan konstituen dalam jumlah yang masif dalam waktu bersamaan, jika menggunakan cara konvensional," ungkap Syaikhu.

Dalam reses ini, Syaikhu berada di satu tempat melakukan zoom. Sementara itu, Para Tenaga Ahli Anggota DPR, yakni Budiwanto, Erwyn Kurniawan, dan lainnya tersebar

di beberapa titik untuk bertemu secara langsung dengan tokoh masyarakat.

Antusiasmenya tak kalah dibandingkan pertemuan secara tatap muka. Ustadz Habibi Somad dari Setu Kabupaten Bekasi begitu semangat menyatakan dukungannya kepada PKS.

"Saya dari dulu dukung PKS. Insya Allah PKS menang di 2024," tegasnya.

Syaikhu juga memberikan bantuan. Salah satunya dalam bentuk kain sarung.

"Ini tentu saja tak seberapa dibandingkan perjuangan yang telah diberikan untuk memenangkan PKS," kata Syaikhu.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Cara ini saya lakukan karena dapil saya yang membentang luas. Tak mungkin saya bertemu dengan konstituen dalam jumlah yang masif dalam waktu bersamaan, jika menggunakan cara konvensional,"

Masa Reses, Diah Nurwitasari Terima Aspirasi Ratusan Masyarakat dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat

KUTIPAN

Jakarta (13/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari menerima sebanyak 275 masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dalam Hari Aspirasi yang merupakan Program Unggulan Fraksi PKS DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (12/05/2022).

Anggota DPR asal Dapil Jabar II ini dalam sambutannya menyampaikan bahwa kedatangan masyarakat Dapil Jabar II disambut sangat positif oleh seluruh elemen di DPR RI.

"Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Sekjen DPR RI yang sudah memfasilitasi kedatangan bapak/ibu sekalian. Tentu dengan jumlah yang sangat banyak awalnya agak pesimis, namun akhirnya Sekjen DPR memberikan izin bapak/ibu

semua untuk nanti melihat apa saja yang ada di kompleks parlemen ini," ujar Diah.

Dalam kesempatan tersebut, Teh Diah biasa disapa, juga mengenalkan kerja-kerja nyata dari Aleg DPR RI FPKS di masing-masing komisi dan Dapil, yang mana senantiasa konsisten membersamai kepentingan Rakyat.

"Kalau di DPR itu ada 11 Komisi, berbeda halnya dengan di DPRD Kabupaten/Kota yang kurang lebih ada 4 Komisi. Setiap Komisi tentu ada bidang

kerja dan mitra kerjanya masing-masing," ungkap Diah.

Teh Diah juga menyampaikan bahwa sebagai Anggota Komisi VII DPR RI, dirinya senantiasa menyuarakan kritik serta saran dalam tema - tema Energi di Indonesia.

"Diantaranya seperti optimalisasi penggunaan sumber daya alam yang ada di dalam Negara Indonesia, serta pelaksanaan kebijakan energi yang tepat dan pro terhadap kepentingan rakyat," jelasnya.

Sementara Perwakilan dari peserta yang hadir, turut menyampaikan rasa gembira karena karena bisa hadir melihat secara langsung gedung rakyat yang diisi oleh Anggota DPR RI.

Para peserta mendoakan para Aleg DPR RI, khususnya PKS yang terbukti komitmen bersama kepentingan masyarakat agar senantiasa bertambah jumlah kursinya.



Dipl.Ing. Hj. **DAIH NURWITASARI**, M. I. POL.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

“Sebagai Anggota Komisi VII DPR RI, dirinya senantiasa menyuarakan kritik serta saran dalam tema - tema Energi di Indonesia. Diantaranya seperti optimalisasi penggunaan sumber daya alam yang ada di dalam Negara Indonesia, serta pelaksanaan kebijakan energi yang tepat dan pro terhadap kepentingan rakyat”



Sakinah Aljufri **Dorong** Haul Guru Tua Masuk Kalender Event Nasional Kemenparekraf

KUTIPAN

Palu (11/05) — Menjelang dilaksanakan kegiatan Haul SIS Aljufri yang ke 54, pada hari Sabtu, 14 Mei 2022 mendatang di Kompleks Al-khairaat. Dalam Haul Habib Idrus Bin Salim Aljufri akan dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan yang dimulai pada tanggal 11 sampai 14 Mei 2022 mendatang.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sakinah Aljufri, daerah pemilihan Sulawesi Tengah menyebutkan, mendukung penuh kegiatan Haul Guru Tua untuk masuk dalam kalender event nasional Kemenparekraf. “Sebagai Wakil Rakyat Sulawesi Tengah dan sebagai cucu serta penerus guru tua, saya terus mendukung festival ini masuk dalam kalender event nasional,” ucapnya.

Lebih lanjut Sakinah menambahkan, event Haul SIS Aljufri (Guru Tua) akan dibuka pada hari Rabu, 11 Mei 2022

sebagaimana yang ia lakukan usulkan dan sampaikan pada rapat Komisi X bersama Kemenparekraf RI di Senayan Jakarta.

“Dalam rapat-rapat dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya selalu mengusulkan kegiatan Haul Guru Tua masuk dalam kalender event nasional dan saya selalu meminta mas menteri untuk hadir dalam kegiatan haul guru tua,” imbuhnya.

Sekretaris Wanita Islam Alkhairaat ini pun berharap, kedepan kawasan SIS Aljufri

tidak hanya menjadi kawasan religi saja tanpa ada kegiatan berkesinambungan yang bernuansa religi. Semoga kawasan religi SIS Aljufri akan terus mendapatkan perhatian pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Harapan saya, kawasan SIS Aljufri ini tidak hanya sekedar kawasan religi semata tanpa ada kegiatan religi. Akan tetapi harus ada kegiatan rutin yang akan menjadi objek wisata religi nantinya. Tidak hanya di wilayah Sulawesi Tengah saja tetapi di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Peringatan Haul Habib Idrus bin Salim Aljufri (Guru Tua) juga mampu menjadi ajang silaturahmi para Abnaukhairaat dan menjadi objek wisata religi.

“Kegiatan Haul SIS Aljufri tidak hanya dihadiri masyarakat luas dari berbagai provinsi di Indonesia, tetapi juga dihadiri masyarakat dari berbagai manca negara,” pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

“Harapan saya, kawasan SIS Aljufri ini tidak hanya sekedar kawasan religi semata tanpa ada kegiatan religi. Akan tetapi harus ada kegiatan rutin yang akan menjadi objek wisata religi nantinya. Tidak hanya di wilayah Sulawesi Tengah saja tetapi di seluruh Indonesia”

Masa Reses di Dapil, Bukhori Laporkan Advokasi Aspirasi Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam

KUTIPAN

Kendal (28/04) — Anggota DPR sekaligus Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah 1 Bukhori Yusuf menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kabupaten Kendal dengan melaporkan perjuangan advokasinya terkait aspirasi Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) kepada Menteri Agama.

Agenda sosialisasi yang sekaligus menjadi forum pertanggungjawaban publik ini dilakukannya sebagai implementasi dari nilai akuntabilitas dan amanah selaku representasi rakyat Jawa Tengah di parlemen.

"Penyuluh agama memiliki kedudukan strategis dalam instansi Kementerian Agama. Mereka adalah ujung tombak sosialisasi kebijakan pemerintah pusat sehingga tanpa peran mereka pesan dari pusat akan sulit bisa diterima oleh masyarakat hingga di tingkat akar rumput," ucap Bukhori di Kendal, Rabu (20/4/2022).

Oleh karena itu, lanjut

Bukhori, pihaknya pernah mengusulkan kepada Menteri Agama supaya kementerian mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif berupa biaya pembinaan bagi penyuluh agama, khususnya non-PNS, dari tingkat desa hingga kecamatan.

"Biaya insentif ini diharapkan bisa menanggulangi kurangnya anggaran mereka dalam menyelenggarakan acara pembinaan. Sebab, mereka masih harus merogoh kocek sendiri untuk agenda pembinaan yang merupakan bagian dari kebutuhan operasional mereka selama ini,"

ungkapnya.

Anggota DPR Dapil Kendal ini mengatakan, penyuluh agama mengemban tanggung jawab yang cukup besar. Pasalnya, tidak jarang segala kegaduhan publik akibat pernyataan maupun kebijakan polemis yang ditimbulkan oleh pemerintah pusat menimbulkan konsekuensi serius bagi aparat di bawah.

"Kendati kontroversi tidak ditimbulkan oleh mereka, namun mereka tetap menanggung risikonya dan menjadi garda terdepan dalam memberikan penerangan atau klarifikasi demi meredam gejala di masyarakat. Ini jelas bukan tugas yang mudah karena risikonya tinggi," keluhnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VIII DPR ini mengatakan pihaknya juga telah menerima aspirasi perihal kebutuhan pengadaan laptop. Menurutnya kebutuhan laptop bagi penyuluh agama dapat dipahami karena pandemi telah mendorong transformasi budaya kerja konvensional menjadi digital.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Meskipun tugas kami selaku DPR sebatas menyampaikan dan mengoreksi kebijakan yang dibuat pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan konstituen kami, In shaa Allah akan kami perjuangkan aspirasi Bapak-Ibu sekalian dengan segala sumberdaya yang dimiliki. Karena itu dukungan dari Bapak-Ibu sekalian sangat berarti bagi kami"





Profil

- Nama Lengkap
Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri, Lc., M.A.
- Tempat, Tanggal Lahir
Surakarta, 17 Juli 1954
- Jabatan
Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera



Pendidikan

- **SDI Diponegoro, Solo (1962), MTs Perguruan Alkhairaat (1969), MA Perguruan Alkhairaat (1972)**
- **S1 (1976), S2 (1980), S3 (1986) Bidang Syariah Univ. Islam Madinah, Arab Saudi (predikat cumlaude)**



Keluarga

- Istri : **Zaenab Alwi Basri**
- Anak : 5 Anak
(1) Idrus Salim,
(2) Sarah Salim
(3) 'Afaf Salim,
(4) Rihab Salim
(5) Sumayyah Salim



Riwayat Organisasi

- **Ketua Dewan Syariah PKS**
- **Wakil Ketua - Persatuan Ulama Muslim Internasional**
- **Ketua Dewan Mustasyar Rabithah Alawiyah (2015 - 2020)**
- **Anggota Dewan Mustasyar Rabithah Alawiyah (2020 - 2025)**



Riwayat Pekerjaan

- **Direktur - Syariah Consulting Center**
- **Dosen - UIN Syarif Hidayatullah**
- **Dosen - Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA)**

DR. SALIM

Ketua Majelis Syura PKS



Media Sosial

- Facebook : **Salim Segaf Al Jufri**
- Instagram : **@salimsegafaljufri**
- Twitter : **@salimsegafaljufri**

Alifudin Hadiri Halal Bihalal Muhammadiyah Kabupaten Kayong Utara

KUTIPAN

Kayong Utara (15/05) --- Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PKS Dapil Kalimantan Barat 1, Alifudin, melakukan kunjungan dapil yang sekaligus menghadiri silaturahmi dan halal bi halal Keluarga Besar Muhammadiyah Kayong Utara.

Dalam silaturahmi tersebut Alifudin diketahui juga pernah tinggal bersama keluarga besar Muhammadiyah, saat pertama kali di Kalimantan barat yaitu Chatib Syarbaini.

"Saya juga punya besan salah satu tokoh Muhammadiyah Kalbar yaitu Almarhum Ishak Saleh serta keluarga saya juga banyak menjadi pengurus Muhammadiyah, makannya saya hadir di halal bi halal Muhammadiyah karena saya bagian dari keluarga Muhammadiyah" Ucap Alifudin saat memberikan Tausiyah, Madrasah Quran Al Hayyu, Sukadana, Sabtu (14/05/2022).

Selain itu, Bang Alifudin juga menyampaikan bahwa kita sebagai umat muslim sudah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan pada bulan syawal ini umat muslim menyambut kemenangan.

"Menyambut kemenangan setelah bulan Ramadhan ini dengan cara saling mendoakan, maka baiknya kita banyak berdoa, seperti saya menjadi Anggota DPR RI karena banyak yang mendoakan saya menang, maka saya mohon doa untuk hadirin sekalian" tambah Alifudin.

Alifudin juga menambahkan bahwa, pada halal bihalal ini kita harus saling memaafkan juga dan tidak

boleh ada dendam diantara kita.

"Seperti riwayat Sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Asshidiq, harus menjadi pelajaran agar tidak saling mendendam antar satu sama lain walau ada fitnah yang menerpa" tegas Alifudin.

Ditempat yang sama, Erwin Sudrajat, Wakil Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kayong Utara, menyampaikan rasa terimakasih dan terhormatnya atas kehadiran Alifudin di acara halal bihalal Muhammadiyah Kayong Utara.

"Kami berterima kasih kepada pa Alifudin, dan dengan ini semoga Pengurus Daerah Muhammadiyah Kayong Utara akan terus tersupport dalam setiap kegiatannya" Ucap Erwin.

Erwin Sudrajat menambahkan, bahwa sebagai keluarga besar Muhammadiyah kita harus selalu mengingat pesat Ahmad Dahlan, yaitu, hidup hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah.



H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat 1

Menyambut kemenangan setelah bulan Ramadhan ini dengan cara saling mendoakan, maka baiknya kita banyak berdoa, seperti saya menjadi Anggota DPR RI karena banyak yang mendoakan saya menang, maka saya mohon doa untuk hadirin sekalian"



Hadiri Acara Syawalan di Dapil, Rofik Minta PKS Banjarnegara Menangkan Pemilu

KUTIPAN

Banjarnegara (15/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto meminta semua kader PKS di Banjarnegara memenangkan pemilu tahun 2024.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Syawalan Keluarga Besar DPD PKS Kabupaten Banjarnegara di Bale Apung Surya Yudha Park, Minggu (15/5/2022).

"Kita bertekad bersama, berjuang bersama untuk memenangkan PKS di Banjarnegara. Saya yakin kalau kita berjuang bersama penuh semangat dan mengharapkan ridho Allah maka PKS Banjarnegara akan menang pemilu 2024. PKS..." teriak Rofik penuh semangat, yang disambut yel-yel semua yang hadir, "Menang! Menang! Menang!"

Kabupaten Banjarnegara, kata anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah VII, mempunyai mimpi

untuk memenangkan pemilu 2024. Sehingga ada harapan besar untuk mempunyai pimpinan di DPRD Banjarnegara.

"Hari ini langkah yang bagus kita bersama berkumpul setelah Ramadhan 1443 H. Semoga Allah memberi kita kekuatan. Saya yakin Ramadhan yang kita lewat ini memberikan spirit yang luar biasa bahwa ke depan PKS Banjarnegara betul-betul menjadi partai yang ditresnani masyarakat, menjadi partai yang menjadi penggerak utama menuju Banjarnegara yang lebih gilar-gilar," katanya.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Muhammad Haris, Anggota

DPRD Jawa Tengah Tri Mulyantoro, Ketua Pembinaan Wilayah Dapil 7 Jateng Nur Sulistiyanto, Ketua DPD PKS Banjarnegara Broto Agung Saputro, dan beberapa Anggota DPRD Banjarnegara.

Ketua DPD PKS Banjarnegara Broto Agung Saputro mengaku bahagia bisa bertemu lagi dengan para kader setelah 2 tahun tidak bisa bertemu karena pandemi.

"Sejak Ramadhan kemarin bakti sosial sudah bisa dilaksanakan di 5 titik. Hari ini kita juga adakan bazar yang diikuti 4 pelaku UMKM. Ini untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Ada juga layanan donor darah dan pemeriksaan mata gratis," ujar Broto.

Dengan jumlah KTA lebih dari 3.000 di Banjarnegara, dia berharap akan lebih banyak lagi masyarakat yang bergabung dengan PKS. Karenanya dia mengajak semua kader untuk memperbanyak silaturahmi kepada masyarakat.

"Dengan bergabung di PKS maka peluang kita untuk melayani masyarakat semakin luas. Semakin banyak masyarakat yang dilayani maka semakin banyak kita akan mendapat pahala dari Allah," tuturnya.

Ketua Pembinaan Wilayah Dapil 7 Jateng Nur Sulistiyanto mengajak seluruh yang hadir untuk menjadikan kegiatan hari itu sebagai titik awal perjuangan jihad politik. Karena pemilu 2024 harus jelas



H. ROFIK HANANTO, S.E.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Kita bertekad bersama, berjuang bersama untuk memenangkan PKS di Banjarnegara. Saya yakin kalau kita berjuang bersama penuh semangat dan mengharapkan ridho Allah maka PKS Banjarnegara akan menang pemilu 2024. PKS.."

langkahnya sejak awal. Hadirnya Ketua DPW Jateng dan anggota DPR RI karena ada harapan besar Banjarnegara bisa memperoleh suara sesuai target.

"Banjarnegara ditarget 17

kursi dalam pemilu 2024. Karenanya kita harus memikirkan strategi agar target itu tercapai. Mari kita siapkan kemenangan," katanya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Masa Reses, Iskan **Hadiri** Monitoring Verifikasi Program Bantuan Kemensos

KUTIPAN

Padang Lawas (15/05) --- Anggota komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis, menghadiri monitoring verifikasi program bantuan Kemensos bagi korban bencana banjir padang lawas bersama tim PSKBA (perlindungan sosial korban bencana alam) Kemensos RI yang berlangsung (11-15/05/2022).

Tim verifikator Kemensos Dika yudhistira menyampaikan bahwa program ini buah perjuangan bersama.

"Kami diutus Ibu Menteri Sosial untuk turun kesini, karena bantuan ini menjadi program prioritas dari Kemensos untuk pemulihan bencana atas usulan pak haji iskan, yang selalu mengingatkan kita semua di Kemensos untuk dapat mempercepat proses pemulihan bencana disini", ujarnya.

Iskan juga menambahkan, bahwa Jangan sampai pembangunan rumah nantinya dilakukan di tepi sungai lagi.

"Banjir bandang yang menerjang 15 desa di

Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, pada akhir Desember 2021, menyebabkan ribuan warga masih tinggal di posko darurat. Harus dirubah tempatnya, bisa menggunakan tanah keluarga. Melalui surat kepala desa. Atau tempat yang memang dianggap aman dan tidak melanggar aturan", ujar Iskan.

Anggota Legislatif asal Sibuhuan ini juga menambahkan bahwa untuk program rumah yang terdampak banjir ini harus segera direalisasikan.

"Dari awal saya memang punya keinginan keras bagaimanapun, ketika bencana ini terjadi di akhir bulan

Desember 2021, penanganan dan pemulihannya harus segera terealisasi. Ada 758 rumah dan beberapa bangunan publik yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Lubu Sutam.

Dan ini bentuk janji saya sebagai seorang Anggota DPR RI. Saya itu disumperjuangkan harus dapat memperjuangkan Daerah Pemilihan. Maka hal ini sudah sepatutnya Saya lakukan. Sebagai pertanggungjawaban sosial saya, bagi konstituen yang telah mengamanahkan saya di DPR RI", tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga menambahkan agar setiap warga di Padang Lawas sudah terverifikasi dan secepatnya mendapat bantuan dari Kementerian Sosial.

"Dari verifikasi ini juga Saya masih berharap agar seluruh masyarakat yang terdada mendapat bantuan seluruhnya,

Kemensos harus mengedepankan prinsip keadilan, 5 bulan lamanya penantian mereka menunggu progres bantuan ini sejak Januari. Maka baik kerusakan kecil, sedang hingga pada kerusakan besar dapat dicover oleh Kemensos," tutup Iskan mengakhiri.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

"Dari awal saya memang punya keinginan keras bagaimanapun, ketika bencana ini terjadi di akhir bulan Desember 2021, penanganan dan pemulihannya harus segera terealisasi. Ada 758 rumah dan beberapa bangunan publik yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Lubu Sutam. Dan ini bentuk janji saya sebagai seorang Anggota DPR RI.



Dirikan Posko Mudik Dr. Salim, Politisi PKS: Bagian Pelayanan PKS untuk Masyarakat

KUTIPAN

Posko tersebut rencananya akan beroperasi selama 24 jam. Oleh karena itu lanjut Netty masyarakat tidak usah khawatir untuk mampir ke posko mudik yang didirikan PKS tersebut.

Jakarta (28/04) — Menjelang Idul Fitri 1443 H, PKS mendirikan Posko Mudik Lebaran di berbagai titik di sepanjang jalan yang kerap dilalui para pemudik.

Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani dalam keterangannya, Kamis (28/04/22), Posko Mudik Dr Salim merupakan salah satu cara PKS dalam membantu dan melayani masyarakat Indonesia.

"Posko mudik didirikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, khususnya para pemudik yang akan bertemu keluarga di kampung halaman," ujar Netty.

Posko tersebut, lanjutnya, dapat disinggahi pemudik untuk beristirahat sebelum

melanjutkan perjalanan.

"Tersedia berbagai macam fasilitas seperti makanan dan minuman gratis, MCK, sarana shalat, charger HP, layanan kesehatan dan bahkan beberapa posko menyediakan layanan Swab Anti Gen, pijat, totok punggung dan mengingat," katanya.

Posko tersebut rencananya akan beroperasi selama 24 jam. Oleh karena itu lanjut Netty masyarakat tidak usah khawatir untuk mampir ke posko mudik yang didirikan PKS tersebut.

"Pemudik yang mampir akan dilayani oleh kader PKS. Kami berharap para pemudik sampai kampung halaman dengan aman dan selamat. Jangan paksakan jika kondisi sudah lelah dan mengantuk.

Lebih baik berhenti sejenak untuk beristirahat. Keselamatan jauh lebih penting," kata Netty.

Peluncuran Posko Mudik Dr Salim, ujar Netty, akan dilakukan langsung oleh Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Al Jufri pada Kamis, 28 April 2022 di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan.



Pemudik yang mampir akan dilayani oleh kader PKS. Kami berharap para pemudik sampai kampung halaman dengan aman dan selamat. Jangan paksakan jika kondisi sudah lelah dan mengantuk. Lebih baik berhenti sejenak untuk beristirahat. Keselamatan jauh lebih penting



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPP PKS

Keliling Dapil Masa Reses, Hermanto Bagikan 1000 Paket Ikan Tuna

KUTIPAN

Padang (29/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan berkeliling membagikan 1000 paket ikan tuna bantuan pemerintah dalam kegiatan Perluasan Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan). Paket-paket ikan tersebut diserahkan kepada masyarakat di 11 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

"Kegiatan Perluasan Safari Gemarikan merupakan bentuk kepedulian negara kepada rakyat," ujar Hermanto dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.

Saat ini, lanjut Hermanto, masih ada masyarakat yang mengalami stunting (kerdil) dan gizi buruk.

"Kita berharap stunting dan gizi buruk ini selesai dimasa Presiden Jokowi," ucap legislator dari FPKS DPR RI ini.

Kegiatan Perluasan Safari Gemarikan ini, jelas Hermanto, merupakan upaya negara

mempromosikan pentingnya makan ikan agar masyarakat tumbuh sehat, kuat dan cerdas.

"Penyerahan paket ikan merupakan stimulus. Dengan stimulus itu selanjutnya para penerima diharapkan bersedia mengkonsumsi ikan secara rutin sesuai dengan kondisi keuangan keluarga masing-masing," tuturnya.

"Targetnya, terjadi peningkatan konsumsi ikan per kapita dari tahun ke tahun," pungkas legislator dari Komisi IV DPR ini.

Satu paket ikan yang

diagikanl berisi tuna beku, abon tuna, rendang tuna, tuna balado, kaos, dan brosur.

Adapun 1000 paket ikan tersebut secara simbolis dibagikan di 6 titik yaitu di Padang (untuk masyarakat Padang dan Pesisir Selatan), Kota Pariaman, Padang Panjang (untuk masyarakat Tanah Datar dan Padang Panjang), Dharmasraya, Sijunjung (untuk masyarakat Sijunjung dan Sawahlunto) dan Kota Solok (untuk masyarakat Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan).

Pada pembagian paket di Padang, hadir juga Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan Minuk Irawati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat Desmiati, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kota Padang Guswardi, anggota DPRD Kota Padang Muharlon dan wakil dari Kabupaten Pesisir Selatan Eko Kurniawan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Kegiatan Perluasan Safari Gemarikan merupakan bentuk kepedulian negara kepada rakyat, Saat ini, masih ada masyarakat yang mengalami stunting (kerdil) dan gizi buruk. Kita berharap stunting dan gizi buruk ini selesai dimasa Presiden Jokowi,"



Kurniasih Kunjungi Posko Mudik Dr Salim di Stasiun Senen, **Pastikan** Layanan Pemudik Perempuan dan Anak

KUTIPAN

Jakarta (01/05) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS daerah pemilihan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri Dr Kurniasih Mufidayati mengunjungi Posko Mudik (Poskodik) Dr Salim yang digelar DPD PKS Jakarta Pusat disekitar Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2022).

Kurniasih menyebut pihaknya memantau dan memastikan layanan Posko Mudik Dr Salim memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi pemudik perempuan dan anak. Selain itu juga ketersediaan fasilitas pemeriksaan kesehatan dan penunjangnya.

"Kunjungan kali ini, memastikan pelayanan terbaik untuk pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya," kata Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan

Keluarga (BPKK) ini.

"Layanan tensi darah, asam urat, gula darah, kolesterol, masyarakat sangat terbantu, yang mau mudik kesehatannya dicek dulu, jadi pemudik yang mau pulang kampung dicek kondisinya sehat wal afiat," sambungnya Anggota Komisi Kesehatan DPR RI ini.

Kurniasih menambahkan, di Poskodik Dr Salim yang didukung Bidang Kesos DPW PKS DKI Jakarta juga ada

layanan ramah anak, makanan untuk anak-anak, obat-obatan untuk antisipasi yang sakit, posko ini menyediakan semuanya. Kurniasih pun menjelaskan, ada sekitar 125 Posko Mudik Dr Salim yang tersebar di seluruh Nusantara, sejak H-7 bahkan H-10 sudah ada yang beroperasi.

"Ini bentuk khidmat dari PKS kepada keluarga-keluarga yang ingin mudik, posko ini juga sangat terpadu dengan adanya layanan kesehatan, makanan dan obat-obatan bahkan ada ruang laktasi bagi kaum ibu dan melayani bekam," papar Juru Bicara PKS ini.

"Tidak lupa, petugas di Posko ini juga memberikan takjil pada waktu menjelang berbuka kepada para pemudik dan warga yang melintas," tambahnya.

Kurniasih mengatakan, lokasi yang sangat strategis ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kemashlatan buat pemudik, dengan pelayanan yang terbaik yang akan kembali ke kampung halaman.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Ini bentuk khidmat dari PKS kepada keluarga-keluarga yang ingin mudik, posko ini juga sangat terpadu dengan adanya layanan kesehatan, makanan dan obat-obatan bahkan ada ruang laktasi bagi kaum ibu dan melayani bekam,"

Kurniasih juga berpesan, jangan lupa baca doa, pastikan kondisi sehat, pastikan semua perlengkapan kendaraan, protokol kesehatan harus dilakukan.

"Dengan doa dan ihtikar, semoga Allah SWT menjaga kesehatan, dilindungi" dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga, selamat mudik selamat berkumpul bersama keluarga, selamat berbahagia dan berle-

baran Idul Fitri," tutup Kurniasih.

Kunjungan Kurniasih kali ini juga didampingi Ketua DPD PKS Jakarta Pusat Ismail yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ketua BPKK PKS Jakarta Pusat Rohimatussa'diyah, Ketua Bidang Kesos PKS Jakarta Pusat Syarif Hidayat dan Ketua Bidang Kesos DPW DKI Jakarta Nuraila.

PROGRAM UNGGULAN FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atakalif Substantif

#MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN FRAKSI PKS DPR RI

Bentuk komitmen kebangsaan Fraksi PKS dengan membahas isu-isu fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan. Menghadirkan tokoh PKS, tokoh bangsa dan pakar yang terkemuka.



Beri Arahan Agenda Struktur Mahfudz Ajak Jaga Kekompakan untuk Raih Kemenangan

KUTIPAN

Bekasi (29/04) — Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS dapil Kota Bekasi dan Kota Depok, Mahfudz Abdurrahman mengahdiri agenda silaturahmi dan konsolidasi struktur PKS se-Kota Bekasi.

Agenda yang diselenggarakan di Kantor DPD PKS Kota Bekasi itu digelar pada Sabtu (23/4).

Hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus DPD PKS Kota Bekasi, mulai dari Ketua Umum DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara; Sekretaris Umum, Daradjat Kardono, dan seluruh Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi, Fraksi PKS, hadir pula sebagai peserta Ketua DPC dan DPRa PKS seluruh Kota Bekasi.

Dalam kesempatan tersebut Mahfudz Abdurrahman yang juga merupakan Bendahara Umum DPP PKS mengingatkan tentang berbagai persiapan dan kesiapan menuju pilg dan pemilu pada 2024 mendatang.

Mahfudz Abdurrahman menjelaskan bahwa, seperti

disampaikan dalam berbagai pertemuan, bahwa target Jawa Barat putih adalah targetan utama untuk dicapai.

“Karena Jabar putih tak akan bisa dicapai tanpa mewujudkan Kota Bekasi putih, begitu seterusnya hingga dilevel Nasional.”

Selain itu, tambah Mahfudz, proses menuju kesana sudah kita pahami bagaimana mewujudkannya, kita hanya perlu mengingat semua itu adalah upaya yang dibangun dari kesolidan tim dan kerja keras yang dilakukan bersama.

“Semoga Allah memudahkan apa-apa yang memang menjadi tanggung jawab kita untuk merealisasikan targetan-targetan tersebut,” tandas Mahfudz.



H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Proses menuju kesana sudah kita pahami bagaimana mewujudkannya, kita hanya perlu mengingat semua itu adalah upaya yang dibangun dari kesolidan tim dan kerja keras yang dilakukan bersama-sama. Semoga Allah memudahkan apa-apa yang memang menjadi tanggung jawab kita untuk merealisasikan targetan-targetan tersebut

Anis Byarwati Dorong Pemda DKI Bangun Kembali Rumah Korban Kebakaran Pasar Gembrong

KUTIPAN

Jakarta (29/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jakarta Timur, Anis Byarwati, melakukan kunjungan ke bekas lokasi kebakaran pasar Gembrong, Jl.Basuki Rahmat, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta timur, Jum'at (29/04/2022).

Dalam kunjungannya, politikus senior PKS Anis Byarwati disambut unsur Muspida seperti Wakil Camat Jatinegara Hj. Endang, Sekretaris Kelurahan Agung, Ketua RW 001 Saiman (Yongki) dan segenap tokoh masyarakat.

Di lokasi kebakaran Anis merasa prihatin atas musibah yang terjadi, Anis pun menyapa langsung dan mendengarkan aspirasi para warga korban kebakaran.

"Para warga sekalian musibah datangnya tanpa kita duga, Semoga Allah SWT menggantikan yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu harus bersabar atas musibah yang

Allah berikan di bulan yang suci ini. Kita semua sangat prihatin, tetapi insyaAllah warga Jakarta turut membantu dan kita mendorong bapak Gubernur agar bisa merealisasikan keinginan bapak ibu semua, bapak ibu sudah dari kecil tinggal disini dan ingin rumahnya segera diperbaiki," tutur Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Politikus senior ini juga berharap Pemda DKI untuk segera membangun kembali rumah para korban kebakaran sesuai keinginan warga.

"Saya berharap Pemerintah DKI Jakarta sesuai keinginan warga membangun kembali rumah para korban

kebakaran, namun begitu dia mengatakan pembangunannya sesuai tata kelola lingkungan, saya juga berharap para warga untuk bersedia mau bekerjasama dengan Pemerintah agar rumahnya dibangun lebih layak, lebih sehat, higienis dan tertata rapi," tukasnya.

Menurutnya, Pemerintah DKI Jakarta bekerjasama dengan unsur kecamatan, kelurahan akan bahu membahu membantu bagaimana baiknya agar rumah yang terbakar ditata dan dapat dibangun kembali.

"Mudah-mudahan keinginan Bapak Ibu dapat didengar bapak Gubernur Anis Baswedan dan pak Wagub Reza Patria beliau saya yakin terenyuh atas musibah ini, dan beliau pemimpin Jakarta yang sangat baik dan selalu memperhatikanarganya. Karena membantu warga sudah menjadi kewajiban Pemerintah," imbuhnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Saya berharap Pemerintah DKI Jakarta sesuai keinginan warga membangun kembali rumah para korban kebakaran, namun begitu dia mengatakan pembangunannya sesuai tata kelola lingkungan, saya juga berharap para warga untuk bersedia mau bekerjasama dengan Pemerintah agar rumahnya dibangun lebih layak, lebih sehat, higienis dan tertata rapi"





Silaturahmi dengan Komunitas Ojek Online (OJOL), Aus Hidayat Nur Jelaskan PKS Rahmatan Lil 'aalamiin

KUTIPAN

Balikpapan (06/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menggelar Silaturahmi dengan komunitas Ojek Online (OJOL) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pertemuan ini dilaksanakan di kantor DPD PKS Kota Balikpapan yang dihadiri oleh anggota komunitas OJOL yang merupakan anggota baru PKS. Pertemuan kali ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dari komunitas OJOL.

Para OJOL mengeluhkan harga BBM yang terus naik dan membuat kesulitan untuk terus bekerja, mereka juga mengeluhkan harga bahan pangan yang terus menanjak ditengah pandemi.

"Selain itu, pertanyaan menarik dilontarkan oleh salah satu OJOL yang bertanya 'Apa visi misi PKS ? dan 'Apakah semua anggota PKS adalah

harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari.

"Saya berpesan pilihan dalam politik akan menentukan harga - harga dalam jangka waktu 5 tahun, maka jangan sampai rakyat dibohongi dengan janji manis para politisi," ujar Aus.

Kemudian Aus mengingatkan juga tentang pilkada dan yang masa jabatannya habis pada 2023 akan ditunda pemilihannya hingga tahun 2024. Sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 dan UU nomor 7 tahun 2017.

Acara diskusi ditutup dengan foto-foto bersama dan juga pembagian bingkisan lebaran.

"Semoga lebaran kali ini dapat menjadi titik balik selesainya pandemi dan OJOL dapat berjaya kembali," tutup Aus.

ustadz ?," ungkapnya "PKS hadir untuk menjadi partai Rahmatan lil 'alaamin, partai terbuka yang memberikan manfaat kepada semua kalangan bagi seluruh rakyat Indonesia" tutur Aus.

Aus juga menjelaskan bahwa tidak semua Anggota PKS berasal dari kalangan 'ustadz' namun juga dari kalangan pengusaha, profesional, dan bahkan kalangan non muslim juga ada yg menjadi perwakilan PKS di Legislatif.

Anggota komisi II ini juga mengingatkan peran politik dalam pengambilan kebijakan, terutama berkaitan dengan



KH. AUS HIDAYAT NUR

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

"Para OJOL mengeluhkan harga BBM yang terus naik dan membuat kesulitan untuk terus bekerja, mereka juga mengeluhkan harga bahan pangan yang terus menanjak ditengah pandemi. Selain itu, pertanyaan menarik dilontarkan oleh salah satu OJOL yang bertanya 'Apa visi misi PKS ? dan 'Apakah semua anggota PKS adalah ustadz ?,'"



Aleg PKS: Perlu Diatur Tata Kelola Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

KUTIPAN

Lampung (09/05) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly, melaksanakan Sosialisasi Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) di Bandar Surabaya, Lampung Tengah, Selasa (10/05).

Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, kata Junaidi, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anggota Komisi XI ini turut mendorong Undang-undang HKPD, sebagai upaya untuk menyempurnakan pelaksanaan

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah berjalan selama ini.

"Namun dengan catatan jika implementasinya Undang-undang HKPD ini terlihat memperkuat arah 're-sentralisasi' dan mereduksi semangat 'desentralisasi', serta berpotensi meningkatkan risiko utang negara dengan dibukanya peluang peningkatan utang daerah maka perlu dikaji ulang," tutup Junaidi.



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I

Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tanggapi Kekosongan Hukum Terkait LGBT, HNW: Pemerintah dan DPR **Harus Segera Mengisi**

KUTIPAN

Jakarta (11/05) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritik narasi yang dipublikasikan bahwa di alam demokrasi Pemerintah tidak bisa melarang LGBT karena tidak adanya aturan hukum yang melarang atau memberikan sanksi terhadap LGBT.

Padahal, kata Hidayat, Dedy Corbuzier yang memantik kontroversi soal LGBT ini, malah merespons positif kritik dan penolakan massif dari masyarakat dengan men-take down tayangannya di YouTube, dan mengaku salah dan meminta maaf.

Maka, lanjut Hidayat, bila benar ada kekosongan hukum yang diperlukan, sewajarnya bila pihak yang berkewenangan segera mengisinya dengan membuat aturan UU baik DPR maupun Pemerintah dengan melakukan inisiatif mengajukan usulan RUU untuk mengisi

'kekosongan hukum' ini.

"Bukan seolah-olah tak berdaya sehingga permisif dan membiarkan terus LGBT dengan kasusnya yang potensial berulang dan berlanjut, apalagi masyarakat luas sudah menolaknya, dan penyimpangannya LGBT jelas-jelas tidak sesuai dengan norma Pancasila dan UUDNRI 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1)," jelas Hidayat.

HNW sapaan akrabnya mengatakan sekalipun demikian, kondisi 'kekosongan hukum' yang diklaim dan bisa

ditanggapi untuk pembaruan atau legalisasi LGBT dengan penyimpangan seksualnya, sudah dari dulu diantisipasi oleh FPKS DPR RI, sehingga dalam pembahasan RUU TPKS, FPKS DPR RI mengusulkan agar tindak pidana terkait seksual bukan hanya yang mengandung unsur 'kekerasan' seksual, tapi juga kejahatan seksual seperti perselingkuhan dan perkawinan sejenis atau perilaku seks menyimpang di kalangan LGBT.

"Sayangnya sikap dan usulan antisipatif dan konstruktif FPKS tidak didukung oleh Fraksi-Fraksi yang lain, juga tidak didukung oleh Pemerintah, sehingga FPKS menolak pengundangan RUU tersebut.

Dan inilah dampak langsungnya. Ketika terjadi kasus LGBT, Pemerintah dengan dalih demokrasi dengan entengnya menyebut tidak ada aturan hukum yang melarang," urai HNW.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Kebutuhan terhadap RUU tersebut sangat mendesak, apabila melihat banyaknya kasus serta reaksi masyarakat luas yang menolak Podcast Deddy Corbuzier dengan pasangan LGBT yang dinilai 'mempromosikan' dan 'membuat tutorial' menjadi gay atau perilaku seks menyimpang"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan
ASPIRASI ANDA
DI HARI ASPIRASI
FRAKSI PKS DPR RI

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokiif Substantif



HARI ASPIRASI RAKYAT (Selasa dan Jum'at)

Karpet merah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Anggota DPR Fraksi PKS, tanpa sulit dan berbelit. Memperkuat fungsi representasi dan relasi konstituensi yang kokoh di DPR.

Sampaikan aspirasi melalui website fraksi.pks.id

Peringatan Harkitnas 2022

Dr. Salim: Momentum Bangkitkan Solidaritas Sosial Nasional

KUTIPAN

Jakarta (20/05) --- Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri memberikan pesan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2022 dengan mengajak seluruh elemen bangsa mengokohkan semangat solidaritas sosial nasional.

"Dua tahun lebih bangsa kita dan dunia dihantam pandemi covid 19. Kondisi perekonomian nasional di awal pandemi juga sedang mengalami penurunan atau slow down. Sehingga dampaknya cukup dalam terhadap ekonomi rakyat. Alhamdulillah saat ini covid mereda dan masyarakat bisa kembali beraktivitas, meski tetap harus waspada," ungkap Dr. Salim.

Dalam kondisi demikian, seluruh elemen bangsa bahu membahu, bekerja sama dan gotong royong, untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Di sini Dr. Salim melihat modal sosial atau sosial capital yang begitu besar yang

dimiliki bangsa Indonesia yaitu semangat solidaritas sosial.

"Luar biasa solidaritas sosial kita terhadap sesama anak bangsa terutama selama pandemi covid ini sehingga kita saksikan semua bergerak. Pemerintah bergerak, swasta bergerak, ormas dan masyarakat sipil bergerak, partai politik bergerak, relawan bergerak. Semua membantu meringankan beban masyarakat," ungkap Dr. Salim.

Menteri Sosial RI 2009-2014 ini menekankan agar semangat solidaritas sosial nasional itu jangan sampai kondor apalagi hilang. Terlebih lagi, setelah pandemi mereda kita fokus untuk

membangkitkan ekonomi rakyat yang terpukul. Selain banyak pekerjaan rumah untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional. Menurut Dr. Salim solidaritas sosial menjadi kunci dan solusi bangkit dari keterpurukan covid 19. Untuk itu sejumlah syarat harus menjadi perhatian.

Pertama, pemerintah termasuk legislatif dan yudikatif harus menghadirkan kebijakan yang benar-benar pro rakyat, kebijakan yang menguatkan pemerataan, keadilan sosial, dan kohesi di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara.

"Solidaritas sosial itu soal rasa kebersamaan dan keadilan. Maka, negara wajib menghadirkan rasa itu," ungkap Dr. Salim.

Kedua, seluruh elemen bangsa, baik di pemerintahan, partai politik, swasta, ormas hingga masyarakat sipil harus mengedepankan semangat kebangsaan di atas kepentingan golongannya.

"Yang ada dari sikap kebangsaan adalah semangat kerjasama, sinergi, dan kolaborasi



Dr. SALIM
Ketua Majelis Syura PKS

“Harkitnas harus menjadi momentum bangsa Indonesia untuk terus menyalakan api semangat solidaritas sosial nasional hingga bangsa ini benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”

atau yang akrab di telinga bangsa kita semangat gotong royong,” ungkap Dr. Salim.

Ketiga, kita perlu terus menerus memupuk keteladanan di tengah masyarakat. Contohkan, lakukan, begitu seterusnya secara konsisten, dan tidak perlu banyak berdebat dan berpolemik. Dengan demikian semangat solidaritas benar-

benar hidup dan menggerakkan lebih banyak orang untuk melakukan hal yang sama.

"Harkitnas harus menjadi momentum bangsa Indonesia untuk terus menyalakan api semangat solidaritas sosial nasional hingga bangsa ini benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," pungkas Dr. Salim.



Perjuangkan Jadi Pahlawan Nasional, Presiden PKS Ziarah ke Makam Kiai Kholil Bangkalan

KUTIPAN

Bangkalan (07/05) --- Presiden PKS Ahmad Syaikhul Awali Silaturrahim Syawal di Jatim dengan Ziarah Makam Syaikhona Kholil Bangkalan.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhul Awali Silaturrahim Syawal melakukan serangkaian kunjungan silaturrahim Syawal di Jawa Timur. Syaikhul Awali Silaturrahim Syawal kunjungannya dengan ziarah makam Syaikhona Kholil, Sabtu, (7/5/2022).

Syaikhul Awali berangkat dari Surabaya dini hari, lalu meluncur ke kediaman KH Thoha Kholil, cicit Syaikhona Kholil. Kemudian bersama menuju Masjid Pesarean Syaikhona Moh. Kholil Bangkalan Madura untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah.

Seusai jamaah subuh, rombongan melakukan ziarah ke makam Syaikhona Kholil yang ada di kompleks masjid.

Dalam pengurusan PKS saat ini, Syaikhul Awali sudah

melakukan ziarah ke Makam Syaikhona Kholil dua kali. Sementara ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan juga sudah melakukan 3 kali ziarah.

PKS memang sedang mengusulkan kepada pemerintah agar Syaikhona Kholil mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Presiden PKS Ahmad Syaikhul Awali menegaskan bahwa sangat pantas jika Syaikhona Kholil dinobatkan menjadi pahlawan nasional.

"Syaikhona Kholil sengaja pulang ke Indonesia dari Mekkah untuk mengajarkan agama kepada para ulama, para tokoh yang menyemangati pejuang Indonesia kala itu," tegas Syaikhul Awali.

Syaikhul Awali menyebut, Syaikhona Kholil merupakan

guru dari 2 ulama terbesar Indonesia yang melahirkan ormas Islam terbesar Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan.

Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa jajaran DPW PKS Jatim sudah mengusulkan melalui anggota DPRD dari PKS.

"Usulan itu juga kami teruskan ke Fraksi PKS DPR RI, untuk terus diperjuangkan di tingkat nasional," ujar pria 45 tahun itu.

Kedatangan Presiden PKS ke Madura dan berziarah ke Makam Syaikhona Kholil mempertegas sikap PKS untuk memperjuangkan Syaikhona Kholil agar dikukuhkan oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional.

"Akan terus kami perjuangkan, beliau adalah guru dari para guru dan tokoh bangsa ini. Beliau guru para kiai yang menjadi spirit perjuangan melawan penjajah merebut kemerdekaan Indonesia," pungkas Irwan.



H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Sangat pantas jika Syaikhona Kholil dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Syaikhona Kholil sengaja pulang ke Indonesia dari Mekkah untuk mengajarkan agama kepada para ulama, para tokoh yang menyemangati pejuang Indonesia kala itu"





**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***